



E-PEDOMAN
MAGANG
BERDAMPAK



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

E-PEDOMAN MAGANG BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah

Dekan Fakultas HUKUM Universitas MULAWARMAN

Ketua Penyusun

WIWIK HARJANTI, S.H., LL.M.

Anggota Tim Penyusun

A. SRIKANDI MPB, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

E-Pedoman ini diadakan dengan tujuan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam hal penyelenggaraan Magang Berdampak - Kampus Berdampak. E-Pedoman ini mengikuti Panduan Penyelenggaraan Magang Berdampak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2025, yang terintegrasi CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan berbasis OBE (*Outcome Based Education*). Melalui E-Pedoman ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum serta Mitra Fakultas Hukum ataupun Universitas Mulawarman dan pihak yang terkait. Diharapkan seluruh civitas akademika pada Fakultas Hukum dapat mengikuti dan memanfaatkan program ini secara optimal.

E-Pedoman ini disusun bersama dengan Dosen-Dosen Fakultas Hukum yang tergabung dalam tim pengembangan program Magang Berdampak, serta masukan dari berbagai pihak, termasuk Pimpinan Fakultas, Kantor Penjaminan Mutu, Biro Administrasi Akademik dan Biro Teknologi Informasi di Universitas Mulawarman. Selanjutnya, E-Pedoman ini dapat dipergunakan untuk panduan implementasi Magang Berdampak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi program.

Samarinda, 9 Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	iv
VISI DAN MISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. TUJUAN UMUM PROGRAM	4
D. TUJUAN KHUSUS PROGRAM	4
E. MANFAAT PROGRAM	4
F. JANGKA WAKTU PROGRAM	5
G. KARAKTERISTIK PROGRAM MAGANG BERDAMPAK	5
BAB II KEGIATAN MAGANG	6
A. DEFINISI.....	6
B. TERINTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	7
C. KONSEP MAGANG BERDAMPAK DALAM KURIKULUM <i>OUTCOME BASED</i> <i>EDUCATION (OBE)</i>	12
D. LINGKUP KEGIATAN	15
E. PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT	15
F. PERSYARATAN MAGANG BERDAMPAK	15
G. TAHAPAN PELAKSANAAN MAGANG BERDAMPAK	22
H. KEWAJIBAN DAN LARANGAN	24
I. MONITORING DAN EVALUASI.....	26
J. PELAPORAN KEGIATAN	33
K. PENILAIAN DAN MEKANISME KONVERSI SKS.....	34
L. PENJAMINAN MUTU PROGRAM	39
M. PENGADUAN DAN TERMINASI PROGRAM.....	40
BAB III PENUTUP	41
REFERENSI	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1** Profil Lulusan
- Tabel 2.2** Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Tabel 2.3** Persyaratan Universitas Mulawarman
- Tabel 2.4** Persyaratan Fakultas
- Tabel 2.5** Persyaratan Program Studi
- Tabel 2.6** Persyaratan Mahasiswa
- Tabel 2.7** Persyaratan Dosen Pembimbing Magang
- Tabel 2.8** Persyaratan Mitra
- Tabel 2.9** Bobot Penilaian Evaluasi Magang
- Tabel 2.10** Komponen dan Bobot Penilaian Magang
- Tabel 2.11** CPL BKP Magang Berdampak
- Tabel 2.12** Jumlah dan Syarat Konversi SKS
- Tabel 2.13** Mata Kuliah – Skema 1
- Tabel 2.14** Mata Kuliah – Skema 2
- Tabel 2.15** Mata Kuliah – Skema 3

LAMPIRAN

- A. INFOGRAFIS REKRUTMEN & SELEKSI MAHASISWA MAGANG BERDAMPAK**
- B. ALUR MAGANG BERDAMPAK FH UNMUL**
- C. KUISIONER MITRA PRA MAGANG BERDAMPAK**
- D. LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK**
- E. LEMBAR PERSETUJUAN ORANG TUA / WALI**
- F. FORM SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN PADA MITRA**
- G. FORM LOGBOOK MAGANG BERDAMPAK**
- H. FORM CAPAIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM KEGIATAN MAGANG**
- I. BUKU BIMBINGAN MAGANG**
- J. FORMAT LAPORAN AKHIR MAGANG BERDAMPAK**
- K. HALAMAN COVER LAPORAN MAGANG**
- L. HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN**
- M. HALAMAN PENGESAHAN**
- N. KUISIONER MAGANG PASCA MAGANG**
- O. KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2026**

VISI DAN MISI

Visi program studi Sarjana Hukum

Universitas Mulawarman menjadi program Studi Sarjana Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

Misi Program Studi Sarjana Hukum

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum
3. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Visi Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan.

Misi Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
3. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi global menuntut perguruan tinggi untuk terus melakukan transformasi dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berfungsi sebagai institusi yang mentransfer pengetahuan secara teoritis kepada mahasiswa, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, keterampilan praktis, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan dunia kerja.

Transformasi pendidikan tinggi pada era modern menekankan pentingnya pembelajaran yang bersifat kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengalaman nyata. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan model pembelajaran yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan pembelajaran di luar kampus yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan kerja profesional.

Sebagai bagian dari upaya transformasi pendidikan tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkenalkan konsep Kampus Berdampak, yaitu sebuah paradigma pendidikan yang menekankan bahwa perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia kerja. Dalam konsep Kampus Berdampak, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat.

Konsep Kampus Berdampak mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat keterkaitan antara proses pembelajaran dengan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu bentuk implementasi dari konsep tersebut adalah melalui penyelenggaraan Program Magang Berdampak, yaitu program pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di berbagai institusi mitra, baik di sektor pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat.

Melalui Program Magang Berdampak, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif dengan terlibat langsung dalam kegiatan kerja profesional. Pengalaman tersebut memungkinkan mahasiswa untuk memahami dinamika dunia kerja, mengembangkan keterampilan profesional, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam konteks praktik nyata.

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pengalaman kerja melalui kegiatan magang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kompetensi profesional di bidang hukum. Praktik hukum pada dasarnya tidak hanya memerlukan penguasaan konsep dan teori hukum, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif, menyusun argumentasi hukum secara sistematis, serta memahami dinamika praktik hukum di berbagai lembaga.

Melalui kegiatan magang di lembaga peradilan, kantor hukum, instansi pemerintahan, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi lainnya, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hukum di lapangan. Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja di bidang hukum, tetapi juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kemampuan analisis hukum, komunikasi profesional, kerja sama tim, serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara efektif.

Selain itu, kegiatan magang juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi saat ini adalah adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki pemahaman teoritis yang baik, namun belum sepenuhnya memiliki pengalaman praktis yang diperlukan dalam dunia kerja.

Melalui pelaksanaan program magang yang terstruktur dan terarah, perguruan tinggi dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di lingkungan kerja profesional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, implementasi kurikulum pendidikan tinggi saat ini juga semakin mengarah pada pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Pendekatan OBE menekankan bahwa proses pendidikan harus berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL) yang terukur. Dalam pendekatan ini, seluruh kegiatan pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi.

Program Magang Berdampak menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang sangat relevan dengan pendekatan OBE. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke

dalam situasi nyata di dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan magang dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Meskipun kegiatan magang telah lama menjadi bagian dari proses pembelajaran di perguruan tinggi, pelaksanaan program magang di berbagai program studi seringkali masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah belum adanya standar pelaksanaan magang yang jelas dan terintegrasi dengan kurikulum program studi. Selain itu, mekanisme pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta konversi kegiatan magang ke dalam satuan kredit semester (SKS) seringkali masih berbeda-beda di setiap program studi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program magang secara lebih sistematis, terarah, dan terukur. Pedoman tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan magang yang diikuti oleh mahasiswa benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan serta mendukung pengembangan kompetensi profesional mahasiswa.

Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyusun Pedoman Program Magang Berdampak sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan magang bagi mahasiswa. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan standar pelaksanaan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk mahasiswa, dosen pembimbing, serta institusi mitra, sehingga pelaksanaan program magang dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran serta pengembangan kompetensi lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

B. LANDASAN HUKUM

Program Magang Berdampak dilaksanakan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
6. Panduan Program Magang Berdampak Tahun 2025

7. Statuta Universitas Mulawarman
8. Kebijakan Akademik Universitas Mulawarman
9. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

C. TUJUAN UMUM PROGRAM

Program Magang Berdampak bertujuan untuk:

1. Memberikan pengalaman kerja profesional kepada mahasiswa.
2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang hukum.
3. Meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja.
4. Meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah hukum.
5. Meningkatkan kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai institusi mitra.
6. Memberikan kontribusi nyata mahasiswa dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat.

D. TUJUAN KHUSUS PROGRAM

Tujuan khusus dari program Magang Berdampak adalah Mahasiswa mampu memenuhi unsur CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

E. MANFAAT PROGRAM

Bagi Mahasiswa :

- Memperoleh pengalaman kerja nyata
- Mengembangkan kompetensi profesional
- Memperluas jaringan profesional
- Meningkatkan kesiapan kerja

Bagi Perguruan Tinggi :

- Meningkatkan kualitas lulusan
- Memperkuat implementasi pembelajaran berbasis praktik
- Meningkatkan kerja sama dengan mitra

Bagi Mitra :

- Memperoleh kontribusi pemikiran dari mahasiswa
- Mendapatkan dukungan dalam penyelesaian masalah organisasi
- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi

F. JANGKA WAKTU PROGRAM

Program Magang Berdampak dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 5 - 6 bulan. Kegiatan magang dapat dikonversi menjadi maksimal 20 SKS sesuai ketentuan akademik.

G. KARAKTERISTIK PROGRAM MAGANG BERDAMPAK

Program Magang Berdampak memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Mahasiswa diberikan tugas yang berkaitan dengan permasalahan nyata di institusi mitra.
2. Mahasiswa mendapatkan pendampingan langsung dari mentor di tempat magang.
3. Setiap mentor membimbing maksimal 10 Mahasiswa.
4. Program dilaksanakan selama 1 semester.
5. Setelah program selesai mahasiswa memperoleh sertifikat kompetensi dari Mitra.

BAB II

KEGIATAN MAGANG

A. DEFINISI

Magang Berdampak adalah suatu program pembelajaran berbasis pengalaman kerja yang diselenggarakan sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam lingkungan profesional guna mengembangkan kompetensi, keterampilan, serta kontribusi nyata terhadap kebutuhan industri dan masyarakat.

Program Magang Berdampak hadir sebagai jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja, sekaligus sebagai ruang belajar yang berdampak langsung bagi mahasiswa, mitra industri, dan institusi pendidikan. Inisiatif ini selaras dengan visi besar Kampus Berdampak, sebuah strategi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mendorong kontribusi aktif perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan mentransformasi sosial-ekonomi nasional.

Secara lebih substantif, Magang Berdampak tidak hanya berorientasi pada pengalaman kerja semata, tetapi juga:

- mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik nyata di dunia kerja,
- menghasilkan Capaian Pembelajaran (learning outcomes) yang terukur,
- memberikan dampak langsung bagi Mahasiswa, Mitra, dan Perguruan Tinggi, serta
- mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan riil di masyarakat dan sektor industri.

Sehingga, Magang Berdampak ini merupakan program pembelajaran kontekstual berbasis kerja nyata yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdampak melalui integrasi antara teori, praktik, dan kontribusi nyata di dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang bermakna, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap ekosistem dunia kerja. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan perguruan tinggi, dosen pendamping, mitra industri, dan mahasiswa untuk melaksanakan program ini dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan komitmen tinggi. Dengan mengedepankan kualitas, relevansi, dan akuntabilitas, kita bersama-sama mendorong pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih berdampak, tanggap terhadap perubahan, dan mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

B. TERINTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

1. Profil Lulusan

Berikut adalah 4 (empat) profil lulusan Program Studi Sarjana Hukum yang disusun berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman berfokus pada Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L) serta Standar Lembaga Akreditasi nasional dan Internasional. Profil ini mengakomodasi tantangan lokal dan global, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, teknologi, dan bisnis.

Tabel 2.1 Profil Lulusan

No	Kode PL	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Kompetensi	Profesi/karir/pekerjaan terkait
1	PL-1	Analisis Hukum dan Profesional Legalpreneur	Lulusan memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat berbasis <i>legal reasoning</i> dan <i>evidence based analysis</i> untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan menerapkan hukum nasional serta internasional. Profil ini menekankan penguasaan analisis regulasi, penyusunan dokumen hukum, pemanfaatan teknologi hukum, serta pemahaman dasar aspek keuangan dan kepatuhan sebagai bagian dari praktik hukum modern.	Legal analyst, legal officer, staf hukum perusahaan, legal compliance officer, legal researcher pada instansi pemerintah, BUMN, korporasi, dan organisasi internasional, legal accounting.
2	PL-2	Praktisi Hukum	Lulusan dipersiapkan sebagai calon praktisi hukum dengan integritas tinggi, pemahaman etika profesi, dan tanggung jawab publik. Profil ini menekankan kesiapan konseptual untuk memasuki profesi penegakan hukum dengan orientasi keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip <i>rule of law</i> dalam praktik hukum yang kompleks dan dinamis.	Advokat, jaksa, hakim, notaris, mediator, arbiter, konsultan hukum setelah menempuh pendidikan dan sertifikasi profesi

3	PL-3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	Lulusan memiliki kompetensi analisis dan perancangan kebijakan publik berbasis hukum dengan rujukan standar <i>good governance</i> dan <i>regulatory impact analysis</i> . Profil ini menekankan kemampuan harmonisasi regulasi, evaluasi kebijakan, serta pemahaman hubungan hukum, ekonomi, dan administrasi publik dalam konteks nasional dan global.	Analisis kebijakan publik, perancang peraturan perundang undangan, aparatur sipil negara, staf legislatif, konsultan kebijakan, policy researcher
4	PL-4	Aktivis Hukum	Lulusan berperan sebagai penggerak keadilan sosial melalui pendampingan hukum, penyelesaian sengketa alternatif, dan penguatan literasi hukum masyarakat. Profil ini selaras dengan agenda global <i>access to justice</i> dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada perlindungan kelompok rentan dan pendekatan hukum berbasis komunitas.	Paralegal profesional, pendamping hukum masyarakat, staf lembaga bantuan hukum, fasilitator mediasi, aktivis hukum dan HAM, aktivis CSO.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirancang agar relevan, adaptif, dan inovatif, sesuai dengan tantangan hukum lokal, nasional, dan global di masa kini dan masa depan dan disusun berdasarkan pertimbangan penjaminan mutu yang diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman berfokus pada Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L) serta Standar Lembaga Akreditasi nasional dan Internasional. Berikut ini adalah Capaian Pembelajaran Lulusan yang berupa pernyataan kemampuan yang menggambarkan kompetensi Profil Lulusan.

Tabel 2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

No	Kode CPL	Kemampuan (Behaviour/Cognitive Process)	Bahan Kajian (Subject Matters)
1	CPL 1	Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam praktik hukum. (Sikap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Ketuhanan & etika publik; moral reasoning dalam profesi hukum 2. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 (nilai dasar bernegara), kewarganegaraan 3. Etika profesi hukum (advokat/jaksa/hakim/notaris), integritas, konflik kepentingan 4. Hak asasi manusia, keadilan sosial, anti-diskriminasi, akses terhadap keadilan (<i>access to justice</i>) 5. Anti-korupsi, budaya kepatuhan, akuntabilitas & tanggung jawab sosial profesi 6. Integritas akademik dan budaya kampus aman-inklusif (pencegahan kekerasan/perundungan/intoleransi sebagai konteks pembentukan karakter)
2	CPL 2	Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum: konsep hukum, tujuan/fungsi, norma, keadilan, kepastian, kemanfaatan 2. Sumber hukum & hierarki peraturan; asas-asas hukum; metode penafsiran & konstruksi hukum 3. Sistem hukum Indonesia: struktur lembaga negara, lembaga penegak hukum, peradilan, administrasi pemerintahan 4. Cabang-cabang hukum dasar (pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, internasional) 5. Perbandingan sistem hukum (civil law/common law), pluralisme hukum (adat–negara–agama), harmonisasi hukum
3	CPL 3	Menguasai konsep hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal, nasional, dan global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good governance, negara hukum, desentralisasi & pemerintahan daerah; pelayanan publik 2. Kebijakan publik berbasis hukum: perumusan–implementasi–evaluasi, <i>regulatory governance</i> 3. Hukum lingkungan & SDA (prinsip pencegahan, kehati-hatian,

			<p>pencemar membayar, keadilan antargenerasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rezim perizinan/pengawasan & penegakan hukum lingkungan/SDA (administratif–perdata–pidana) 5. Hukum kehutanan, pertambangan, perkebunan/agraria, pesisir-laut, perubahan iklim (konteks Kaltim/HTB+L) 6. Kerangka internasional: <i>sustainable development</i>, SDGs, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional
4	CPL 4	Mampu merancang dan menelaah dokumen hukum berupa kontrak, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan keputusan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legal drafting & legal writing (struktur, bahasa hukum, logika norma/klausul) 2. Perancangan kontrak: jenis kontrak, klausul kunci (objek, prestasi, wanprestasi, force majeure, penyelesaian sengketa, <i>governing law</i>) 3. Perancangan peraturan perundang-undangan: teknik perumusan norma, definisi, sistematika, harmonisasi, <i>legal coherence</i> 4. Analisis putusan pengadilan: ratio decidendi, pertimbangan hukum, konsistensi yurisprudensi 5. Keputusan administrasi pemerintahan: kewenangan, prosedur, diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), legalitas tindakan pemerintah
5	CPL 5	Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian hukum: normatif/doctrinal, socio-legal/empiris, studi kasus, komparatif 2. Legal reasoning & <i>issue spotting</i>: IRAC/CREAC, penalaran berbasis norma–fakta–bukti 3. Analisis kritis norma & praktik: gap implementasi, disharmoni regulasi, <i>regulatory compliance</i> 4. Penyusunan <i>legal memo</i>, <i>policy brief</i>, rekomendasi kebijakan (argument map, opsi kebijakan, risiko-dampak) 5. Dasar <i>regulatory impact analysis</i> (RIA) & evaluasi kebijakan hukum (problem definition, stakeholder, opsi & konsekuensi)

6	CPL 6	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum acara & strategi beracara (perdata, pidana, TUN; alat bukti, pembuktian, upaya hukum) 2. Teknik advokasi: analisis berkas perkara, penyusunan gugatan/permohonan/pledoi, <i>case theory</i> 3. ADR: negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase; etika ADR & desain kesepakatan 4. Pendekatan keadilan substantif: perlindungan kelompok rentan, bantuan hukum, <i>restorative justice</i> 5. Keterampilan praktik: wawancara klien, konseling hukum, manajemen konflik & komunikasi persuasif
7	CPL 7	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik hukum, analisis regulasi, dan pelayanan hukum dengan memperhatikan prinsip keamanan data, etika, dan kepatuhan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar legal tech: manajemen dokumen, <i>legal research tools</i>, e-court/e-litigation, e-signature 2. Bukti & forensik digital dasar; tata kelola arsip/data perkara 3. Hukum dan teknologi (cyberlaw), etika profesi di ruang digital, kepatuhan regulasi digital 4. Privasi & keamanan data: prinsip perlindungan data, <i>data governance</i>, mitigasi risiko kebocoran 5. Pemanfaatan AI dalam layanan hukum (ruang lingkup, bias/etika, akuntabilitas, <i>human-in-the-loop</i>) (<i>Selaras dengan standar pengelolaan data/informasi yang menekankan keamanan & privasi data</i>).
8	CPL 8	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi hukum lisan & tulisan: argumentasi, presentasi, negosiasi, komunikasi publik 2. Legal English dasar & literasi dokumen hukum internasional (kontrak/perjanjian/putusan) 3. Kolaborasi & kerja tim: peran, manajemen proyek, <i>team-based project</i> (selaras IKU/case method) 4. Interdisipliner: pengantar ekonomi/keuangan untuk hukum, kebijakan publik, teknologi, lingkungan 5. Kompetensi global: isu lintas batas (bisnis internasional, HAM,

			lingkungan), sensitivitas budaya & etika profesional
9	CPL 9	Mampu melakukan analisis dan audit hukum secara dasar terhadap aktivitas organisasi, kebijakan, dan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan dan tata kelola.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legal audit & <i>legal risk management</i>: identifikasi risiko, pemetaan kepatuhan, temuan & rekomendasi 2. <i>Due diligence</i> dasar (korporasi, kontrak, perizinan), kepatuhan internal & SOP 3. Tata kelola organisasi/perusahaan (GCG), peran organ, kebijakan internal, akuntabilitas 4. Dasar “keuangan untuk sarjana hukum”: membaca dokumen keuangan sederhana, kepatuhan transaksi & kontrol internal 5. Kepatuhan sektor spesifik (contoh: pengadaan, anti-fraud/anti-korupsi, AML dasar, ESG/compliance lingkungan—bisa dikontekstualkan Kaltim/HTB+L)

C. KONSEP MAGANG BERDAMPAK DALAM KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

Kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) sendiri merupakan standar proses pembelajaran yang memiliki beberapa karakter diantaranya: berorientasi pada kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan sistem pembelajaran yang interaktif dan inovatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman serta dengan memperhatikan kebutuhan lulusan. Konsep *Outcome Based Education* (OBE) merupakan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian hasil belajar (*learning outcomes*) yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program. OBE tidak hanya menekankan proses, tetapi lebih pada apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh lulusan.

Indikator OBE sendiri terdapat pada beberapa aspek penting seperti *learning outcomes* (hasil dari pembelajaran), *assessment methods* (metode evaluasi), *curriculum design* (desain kurikulum yang berisi materi pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran serta aktivitas belajar), *feedback mechanism* (sistem umpan balik untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kebutuhan mahasiswa pada mata kuliah sehingga mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan), dan *continuous improvement* (proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan hasil belajar).

Pemberlakuan kurikulum berbasis OBE pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman merupakan penyesuaian terhadap substansi kurikulum atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Mulawarman yang mewajibkan adanya *team based project* atau *case method* sebagai metode dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) ini, menekankan bahwa pembelajaran harus berorientasi pada hasil (*learning outcomes*), metode evaluasi, desain kurikulum, serta mekanisme perbaikan berkelanjutan.

Dalam pendekatan OBE, setiap aktivitas pembelajaran dirancang untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi. Oleh karena itu, Program Magang Berdampak memiliki peran penting sebagai pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memungkinkan mahasiswa menerapkan teori hukum dalam praktik nyata di dunia kerja.

Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum, komunikasi profesional, kerja sama tim, serta keterampilan penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Dengan demikian, Program Magang Berdampak menjadi bagian dari implementasi kurikulum OBE yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan.

Dalam kerangka tersebut, Program Magang Berdampak memiliki keterkaitan langsung dengan kurikulum karena:

1. Menjadi media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*)
2. Mendukung pencapaian CPL program studi
3. Menghubungkan pembelajaran akademik dengan praktik hukum di dunia kerja
4. Mendukung metode pembelajaran *case method* dan *problem-based learning* yang diwajibkan dalam kurikulum.

Dengan demikian, kegiatan magang merupakan bagian dari implementasi pembelajaran OBE dalam kurikulum.

Konsep *Outcome-Based Education* (OBE) meliputi:

1. Outcome Based Curriculum (OBC)

Outcome-Based Curriculum (OBC) adalah perancangan kurikulum yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ingin dicapai.

Karakteristik utama OBC:

- Dimulai dari penetapan profil lulusan
- Diturunkan menjadi CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

- Di-breakdown menjadi CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
- Setiap mata kuliah memiliki kontribusi jelas terhadap CPL

2. Outcome Based Learning (OBL)

Outcome-Based Learning (OBL) adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mencapai CPL dan CPMK yang telah ditetapkan.

Karakteristik utama OBL:

- Berbasis student-centered learning
- Menggunakan metode aktif:
 - 1) diskusi kasus
 - 2) problem-based learning
 - 3) project-based learning
 - 4) simulasi (misalnya moot court untuk hukum)
 - 5) Dosen berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu

3. Outcome Based Assessment (OBA)

Outcome-Based Assessment (OBA) adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian CPL dan CPMK secara objektif dan terukur.

Karakteristik utama OBA:

- Menggunakan assessment autentik
- Berbasis indikator yang jelas (rubrik)
- Tidak hanya ujian tertulis, tetapi juga:
 - 1) tugas proyek
 - 2) presentasi
 - 3) portofolio
 - 4) praktik lapangan (magang)

Sehingga, konsep ini tentu menilai apakah mahasiswa benar-benar mencapai kompetensi, mampu memberikan feedback untuk perbaikan pembelajaran, serta dapat menjadi dasar evaluasi kurikulum. Sementara itu, dalam program Magang Berdampak, penilaian tidak hanya melalui laporan tertulis, tetapi juga kinerja di tempat magang, penilaian dari Mitra, serta refleksi Mahasiswa itu sendiri.

D. LINGKUP KEGIATAN

1. Kegiatan Magang Berdampak memberikan kesempatan bagi Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi selama 1 semester, dengan pengakuan dan konversi sesuai pedoman Magang Berdampak
2. Magang dilaksanakan pada Mitra Magang Berdampak yaitu Perusahaan, Yayasan Nirlaba, Organisasi Multilateral, Institusi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Rintisan (*Startup*) dan Professional, yang sudah menandatangani MOU dengan Universitas Mulawarman atau Surat Perjanjian Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Pekerjaan yang diikuti Mahasiswa Magang Berdampak harus relevan dengan bidang / kompetensi ilmu Hukum.

E. PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT

Program Magang Berdampak melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Mulawarman
2. Fakultas dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
3. Program Studi dalam hal ini Program Studi Sarjana Hukum
4. Mahasiswa
5. Dosen Pembimbing Magang
6. Mitra Kerja & Mentor / Pembimbing Lapangan (yang disediakan oleh Mitra)

F. PERSYARATAN MAGANG BERDAMPAK

Program Magang Berdampak melibatkan Mahasiswa sebagai peserta, Universitas Mulawarman, Fakultas Hukum, Mitra dan Mentor sebagai penyedia magang dan studi independen, yang bersinergi untuk meningkatkan kualitas program. Untuk itu, diperlukan rekrutmen mahasiswa sesuai kualifikasi mitra dengan persyaratan yang sesuai.

1. Perguruan Tinggi

Dalam melaksanakan Magang MBKM, Universitas Mulawarman perlu memenuhi hal berikut:

Tabel 2.3 Persyaratan Universitas Mulawarman

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Telah bekerjasama dengan Mitra Magang Berdampak, dalam bentuk MOU	MOU
b.	Perguruan tinggi menyusun Pedoman Penyelenggaraan Magang Berdampak, termasuk mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama melakukan aktivitas magang	Pedoman Magang Berdampak
c.	Melaporkan hasil kegiatan Magang Berdampak ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Laporan Magang Berdampak Universitas Mulawarman

2. Fakultas

Dalam melaksanakan Magang, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman perlu memenuhi hal berikut:

Tabel 2.4 Persyaratan Fakultas Hukum

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Telah bekerjasama dengan Mitra Magang Berdampak, dalam bentuk perjanjian kerjasama	Perjanjian Kerja Sama
b.	Fakultas menyusun Pedoman Magang Berdampak, termasuk mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama dalam kegiatan magang	Pedoman Magang Berdampak

c.	Melaporkan hasil kegiatan Magang Berdampak ke Universitas Mulawarman	Laporan Kegiatan Magang Berdampak FH Unmul
----	--	--

3. Program Studi

Dalam melaksanakan Magang, Program Studi Sarjana Hukum, perlu memenuhi hal berikut:

Tabel 2.5 Persyaratan Program Studi

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Menyepakati kerjasama dengan mitra magang dalam bentuk IA (Implementation of Arrangement)	IA (Implementation of Arrangement)
b.	Menyusun Pedoman Magang Berdampak dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama dalam kegiatan magang	Pedoman Magang Berdampak
c.	Mensosialisasikan program Magang Berdampak kepada mahasiswa	Dokumentasi Sosialisasi
d.	Melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap mahasiswa yang mendaftar program Magang Berdampak ini	Dokumentasi rekrutmen dan seleksi Magang Berdampak
e.	Memberikan surat rekomendasi atau persetujuan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan	Surat Rekomendasi
f.	Menugaskan dosen pembimbing untuk program Magang Berdampak ini	SK Dosen Pembimbing Magang Berdampak

g.	Melaporkan hasil kegiatan Magang Berdampak ke Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Laporan Kegiatan Magang Berdampak Program Studi
----	---	---

4. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa yang dapat mengikuti program Magang Berdampak harus memenuhi persyaratan:

Tabel 2.6 Persyaratan Mahasiswa

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Warga Negara Indonesia	KTP dan/atau surat keterangan domisili
b.	Mahasiswa aktif (sedang tidak cuti) dan belum dinyatakan lulus pada program sarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;	Bukti data pada STAR FH Unmul
c.	Pada saat pendaftaran, Mahasiswa program sarjana paling rendah atau minimal terdaftar pada semester 4 (empat);	Bukti data pada STAR FH Unmul
d.	Telah menempuh mata kuliah minimal 63 SKS;	Bukti data pada STAR FH Unmul
e.	Memiliki IPK minimal 2,75	Bukti data pada STAR / AIS FH Unmul
f.	Mendapatkan persetujuan Program Studi atau rekomendasi dari Perguruan Tinggi untuk mengikuti Magang Berdampak;	Persetujuan Program Studi atau Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi
g.	Mendapatkan persetujuan Program Studi atau rekomendasi dari Perguruan Tinggi untuk mengikuti Program Magang Berdampak;	Persetujuan Program Studi atau Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi
h.	Bersedia menandatangani tata tertib dan kewajiban peserta Magang Berdampak	Tata Tertib dan Kewajiban Peserta

i.	Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan Program Magang Berdampak hingga selesai;	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa
j.	Lulus proses seleksi oleh Mitra;	<i>Letter of Acceptance</i> (LoA)
k.	Membuat proposal kegiatan Magang Berdampak yang ingin di ikuti	Proposal Magang Berdampak yang ingin diikuti
l.	Kegiatan Magang Berdampak yang diikuti merupakan program yang diadakan oleh pemerintah atau instansi yang sudah memiliki MOU dengan Universitas	MOU
m.	Jenis mata Kegiatan yang diambil harus memenuhi ketentuan CPMK Prodi	CPMK Prodi
n.	Jumlah SKS maksimal yang dapat dikonversi adalah 20 SKS	-
o.	Menyetujui bahwa kegiatan Magang Berdampak yang dapat dikonversi adalah sejumlah SKS yang sesuai dengan CPL Mata Kuliah dan/atau jumlah jam magang dan di setujui oleh Prodi. Agar dapat muncul di KHS, maka mata kuliah hasil konversi Kegiatan MBKM harus di masukkan dalam KRS, baik semester berjalan maupun semester berikutnya (membayar SPP)	-
p.	Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kegiatan Magang Berdampak sebagai dasar konversi Mata Kuliah.	Laporan Magang Berdampak

5. Dosen Pembimbing Magang

Dalam melaksanakan Magang Berdampak, Dosen Pembimbing, perlu memenuhi hal berikut:

Tabel 2.7 Persyaratan Dosen Pembimbing Magang

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah memiliki NIDN di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Bukti data di SISTER
b.	Dosen Pembimbing adalah dosen yang diberi SK Dekan untuk melakukan pembimbingan Magang Berdampak	SK Pembimbing magang Berdampak
c.	Dosen Pembimbing memahami Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Berdampak yang telah ditetapkan.	-

6. Mitra

Dalam melaksanakan Magang Berdampak, Mitra kerja perlu memenuhi hal berikut:

Tabel 2.8 Persyaratan Mitra

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Instansi / Organisasi Pemerintahan maupun Non pemerintah dan badan hukum perdata;	-
b.	Bagi instansi pemerintah dan badan hukum perdata yang pernah menjadi mitra program magang berdampak harus memiliki rekam jejak yang baik;	Surat kesediaan menjadi mitra
c.	Bagi Instansi Pemerintah dan	Surat kesediaan

	Badan Hukum Perdata yang belum pernah menjadi Mitra dapat melalui jalur undangan atas pertimbangan kapasitas, rekam jejak, dan reputasi, relevansi bidang usaha/kerja/kegiatan, serta pertimbangan lain dengan mengutamakan kepentingan peningkatan kompetensi Mahasiswa; dan	menjadi Mitra
d.	Mitra ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Universitas Mulawarman dengan instansi atau mitra Magang Berdampak.	<i>Letter of Agreement (LoA)</i> atau Surat Perjanjian Kerja Sama

Mitra magang dapat berasal dari :

- a) Instansi Pemerintah
- b) BUMN
- c) Lembaga Peradilan
- d) Kantor Hukum
- e) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- f) Perusahaan
- g) Organisasi Non-Pemerintah
- h) Yayasan Nirlaba
- i) Organisasi Multilateral
- j) Perusahaan Rintisan (Startup)
- k) Professional.

Mitra wajib menyediakan :

- a) Mentor / Pembimbing Lapangan
- b) Program kerja bagi mahasiswa
- c) Evaluasi kegiatan mahasiswa

Perlu diperjelas, bahwasanya dalam pelaksanaan Magang Berdampak ini, kurikulum magang tidaklah disusun oleh Mitra. Melainkan kurikulum tetap menjadi kewenangan Program Studi/Fakultas dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai bagian dari implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Namun demikian, penyusunan kurikulum magang tersebut haruslah dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan ruang lingkup kerja Mitra melalui mekanisme kolaboratif. Mitra berperan dalam menyediakan program kerja, deskripsi tugas, serta evaluasi kinerja mahasiswa, yang kemudian dipetakan oleh Program Studi/Fakultas ke dalam CPL dan skema konversi SKS. Sehingga, dengan demikian kurikulum Magang Berdampak bersifat akademik tetapi kontekstual, serta menjadi hasil sinergi antara Perguruan Tinggi dan Mitra.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN MAGANG BERDAMPAK

1. Tahap Persiapan / Pra Magang Berdampak

Persiapan yang dilakukan Prodi/Fakultas meliputi:

- a. Sosialisasi mekanisme Magang Berdampak kepada Mahasiswa
- b. Penetapan jadwal pendaftaran, seleksi/validasi, dan penempatan.
- c. Koordinasi dengan Mitra untuk penetapan Mentor/Pembimbing Lapangan, ruang lingkup tugas, dan jadwal kerja.
- d. Penugasan Dosen Pembimbing Magang serta penyediaan format dokumen (*logbook*, laporan, *form* penilaian).
- e. Pendaftaran Mahasiswa
- f. Rekrutmen & Seleksi Peserta
- g. Penempatan Mahasiswa
- h. Pembekalan Mahasiswa

Pembekalan mahasiswa wajib dilakukan sebelum berangkat magang, dan Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang mencakup:

- a. Etika profesi hukum, komunikasi kerja, budaya kerja organisasi, dan kerahasiaan data
- b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kepatuhan tata tertib Mitra
- c. Penyusunan rencana kerja, deliverables, logbook, dan Penyusunan laporan (Laporan Bulanan & Laporan Akhir)
- d. Teknis penilaian, seminar/presentasi akhir, dan ketentuan konversi SKS

2. Tahap Pelaksanaan Magang

Mahasiswa melaksanakan kegiatan seperti:

- a. Observasi proses kerja lembaga hukum
- b. Analisis dokumen hukum
- c. Penyusunan kajian hukum
- d. Pendampingan penanganan perkara
- e. Kegiatan administrasi hukum
- f. Jam kerja maksimal 40 jam per minggu.

Ketentuan Pelaksanaan Magang :

- a. Mahasiswa melaksanakan magang sesuai jam kerja dan SOP mitra.
- b. Mahasiswa mengisi logbook harian/mingguan dan melaporkan progres kepada mentor dan Dosen Pembimbing Magang.
- c. Dosen Pembimbing Magang melakukan pembimbingan minimal 3 kali dan dapat melakukan kunjungan/rapat monitoring.
- d. Mitra memberikan tugas yang selaras dengan rencana kerja dan melakukan pembimbingan melekat.

3. Tahap Akhir Magang

Pada akhir periode, Mahasiswa menyusun laporan akhir dan menyampaikan output / deliverables kepada mitra. Pada tahap ini, Mahasiswa juga wajib melakukan refleksi atas pengalaman pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan magang, termasuk identifikasi kompetensi yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi di lapangan. Selain itu, Mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar atau presentasi hasil magang sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Penilaian akhir dilakukan berdasarkan laporan tertulis, performa selama magang, serta evaluasi dari Mitra / Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Magang. Seluruh dokumen administrasi, termasuk logbook, laporan bulanan, dan laporan akhir, harus diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar konversi SKS dan penetapan nilai akhir.

H. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. KEWAJIBAN

Kewajiban disini ialah berupa tanggung jawab para pihak dalam Magang Berdampak yang mencakup :

a. Program Studi

- 1) Menetapkan kebijakan, alur, dan jadwal penyelenggaraan Magang Berdampak
- 2) Memastikan ketersediaan dokumen kerja sama (MoU/MoA/PKS/IA) dengan mitra atau mekanisme legal setara
- 3) Menugaskan Dosen Pembimbing Magang
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Magang Berdampak
- 5) Memfasilitasi konversi SKS dan input nilai sesuai prosedur akademik

b. Mahasiswa

- 1) Memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti Magang Berdampak
- 2) Mengikuti seluruh kegiatan Magang Berdampak
- 3) Mematuhi aturan Mitra
- 4) Menjalankan tugas sesuai jam kerja/ketentuan Mitra dengan etika profesi
- 5) Mengisi logbook dan laporan periodik tepat waktu
- 6) Menghasilkan deliverables sesuai kesepakatan (rencana kerja) dan menyusun/menyerahkan laporan akhir kegiatan Magang Berdampak
- 7) Menjaga nama baik Universitas serta mematuhi peraturan K3/Kerahasiaan mitra.

c. Dosen Pembimbing Magang

- 1) Menyetujui rencana kerja (learning agreement) dan memastikan kesesuaian CPL/CPMK yang dikonversi
- 2) Melakukan pembimbingan berkala (minimal 3 kali) dan meninjau logbook mahasiswa
- 3) Berkoordinasi dengan mentor mitra/pembimbing lapangan terkait perkembangan mahasiswa dan kendala lapangan
- 4) Melaksanakan penilaian akademik (termasuk seminar/presentasi hasil) dan merekomendasikan konversi SKS

d. Mitra

- 1) Menyediakan pekerjaan/tugas yang relevan, terukur, dan aman bagi mahasiswa
- 2) Menunjuk Mentor/Pembimbing Lapangan yang membimbing dan menilai kinerja mahasiswa
- 3) Memberikan akses data/informasi yang wajar untuk penyelesaian tugas (dengan memperhatikan kerahasiaan)
- 4) Memberikan umpan balik terhadap kinerja dan luaran mahasiswa, termasuk validasi *output*
- 5) Menerbitkan surat keterangan/sertifikat magang (jika memungkinkan)

2. LARANGAN

Selama mengikuti kegiatan Magang Berdampak, mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hukum dan Etika

- 1) Melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan
- 2) Melanggar etika profesi hukum dan norma kesopanan
- 3) Melakukan tindakan yang merugikan nama baik instansi, kampus, dan diri sendiri

b. Pelanggaran Disiplin dan Tanggung Jawab

- 1) Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- 2) Datang terlambat secara berulang tanpa izin
- 3) Meninggalkan tempat magang tanpa persetujuan mentor/pembimbing
- 4) Tidak melaksanakan tugas yang diberikan

c. Penyalahgunaan Data dan Informasi

- 1) Membocorkan data, dokumen, atau informasi rahasia milik instansi
- 2) Menggunakan data instansi untuk kepentingan pribadi tanpa izin
- 3) Menyebarkan informasi internal melalui media sosial atau pihak lain

d. Penyalahgunaan Wewenang

- 1) Menggunakan posisi sebagai mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi
- 2) Mengambil keputusan di luar kewenangan yang diberikan

3) Mengatasnamakan instansi tanpa izin resmi

e. Pelanggaran Akademik

- 1) Tidak mengisi *logbook* atau laporan kegiatan
- 2) Memalsukan data kegiatan magang
- 3) Menyalin atau melakukan plagiarisme dalam laporan

f. Perilaku Tidak Profesional

- 1) Bersikap tidak sopan kepada mentor, pegawai, atau pihak lain
- 2) Tidak menjaga sikap, komunikasi, dan penampilan profesional
- 3) Tidak mampu bekerja sama dalam tim

g. Pelanggaran terhadap Aturan Mitra

- 1) Tidak mematuhi SOP, tata tertib, dan budaya kerja instansi
- 2) Mengabaikan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 3) Menggunakan fasilitas instansi secara tidak semestinya

h. Pengunduran Diri Sepihak

- 1) Mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan
- 2) Tidak menyelesaikan program magang sampai selesai

I. MONITORING DAN EVALUASI

1. MONITORING

Monitoring adalah proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak. Monitoring dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah melalui kuesioner. Kuesioner merupakan alat/instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses monitoring, yang diberikan kepada Mitra Kerja dan/atau Mahasiswa pada tahap pra, proses, dan pasca kegiatan Magang Berdampak. Jadi, Kuesioner ini digunakan untuk:

a. Pra Magang Berdampak:

Kuisisioner diberikan kepada Mitra, agar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat mengetahui atau mengukur hal-hal berikut :

- 1) Agar dapat diidentifikasi/diketahui apa saja kebutuhan Mitra dalam proses Magang (*need-based*):

- a) Jenis pekerjaan/tugas yang tersedia pada Mitra
 - b) Bidang hukum yang relevan (litigasi, non-litigasi, administrasi, dll.)
 - c) Kualifikasi mahasiswa yang dibutuhkan
- 2) Agar dapat ditentukan jumlah dan kriteria Mahasiswa:
- a) Berapa Mahasiswa yang dibutuhkan pada Mitra tersebut
 - b) Semester atau kompetensi minimal
 - c) Skill khusus (misalnya: *legal drafting*, riset hukum, dll)
 - d) Penempatan jadi lebih tepat dan profesional.
- 3) Agar rencana kegiatan Magang dapat disusun dengan baik:
- a) Aktivitas apa saja yang akan diberikan kepada Mahasiswa
 - b) *Output* yang diharapkan (laporan, draft hukum, dll.)
 - c) Pola pembimbingan
 - d) Mahasiswa magang tidak hanya “ikut-ikutan kerja”, tapi terarah.
- 4) Agar dapat menjamin kesesuaian dengan kurikulum (OBE):
Membantu mencocokkan kebutuhan mitra dengan Capaian pembelajaran lulusan (CPL). Sehingga magang benar-benar dapat mendukung kurikulum, bukan di luar konteks akademik.
- 5) Agar dapat diketahui dasar / data awal Monitoring dan Evaluasi dari Sisi Mitra:
- a) Membandingkan antara rencana dan pelaksanaan
 - b) Menilai apakah mahasiswa sudah memenuhi ekspektasi
 - c) Mengukur “dampak” dari sudut pandang mitra.
- 6) Agar dapat membangun komitmen dan kerja sama yang jelas dengan Mitra:
- a) Menyatakan kesiapan menerima Mahasiswa
 - b) Memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai Mitra
 - c) Mengurangi risiko miskomunikasi selama magang.

b. Proses / Saat magang:

Monitoring pada tahap proses / saat magang bertujuan untuk melihat progres guna memastikan bahwa kegiatan magang berjalan sesuai rencana, mencapai target pembelajaran, dan tetap berada dalam kendali kualitas program.

- 1) Memastikan Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana

- a) Melihat apakah tugas yang diberikan sesuai dengan rencana kerja (*learning agreement*)
 - b) Aktivitas mahasiswa relevan dengan bidang studi
 - c) Tidak terjadi penyimpangan kegiatan / tidak “melenceng” dari tujuan akademik.
- 2) Mengontrol Progres dan Kinerja Mahasiswa
- a) Menilai apakah mahasiswa aktif atau pasif
 - b) Apakah tugas diselesaikan dengan baik
 - c) Perkembangan kompetensi (*skill & sikap*)
 - d) Agar Dosen Pembimbing dan Mitra/Pembimbing Lapangan tahu posisi perkembangan mahasiswa.
- 3) Mengidentifikasi Kendala Secara Dini
- Menemukan masalah sejak awal dan bisa segera diperbaiki.
Misalnya:
- a) Mahasiswa tidak mendapat tugas yang jelas
 - b) Kurangnya pembimbingan
 - c) Konflik di tempat magang
- 4) Menjamin Kualitas Pembelajaran *Outcome-Based Education* (OBE)
- Dalam pendekatan OBE, monitoring memastikan:
- a) Mahasiswa sedang menuju capaian pembelajaran
 - b) Aktivitas magang benar-benar mendukung kompetensi
 - c) Bukan sekadar “hadir kerja”, tapi benar-benar belajar.
- 5) Menjaga Komunikasi antara Kampus - Mahasiswa - Mitra
- a) Sebagai Jembatan komunikasi
 - b) Sebagai Media koordinasi jika ada kendala
 - c) Sebagai sarana evaluasi sementara
- 6) Dasar Evaluasi dan Penilaian Akhir
- a) Menilai proses (bukan hanya hasil akhir)
 - b) Menjadi bukti objektif penilaian
 - c) Mendukung laporan magang
 - d) Agar sistem penilaian yang adil dan terukur.

c. Pasca Magang (Evaluasi):

- 1) Menilai hasil dan dampak Magang Berdampak
- 2) Menilai perkembangan Mahasiswa

- 3) Mengukur kepuasan Mitra Kerja terkait kegiatan Magang Berdampak
- 4) Mengidentifikasi kendala di lapangan
- 5) Mengevaluasi Capaian Pembelajaran

Monitoring juga sebagai salah satu bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan, dengan mengisi kuisisioner tentang pengalaman dan penilaian Mahasiswa terhadap kualitas program Magang Berdampak yang mereka jalani selama 1 semester diluar Program Studi. Adapun Prosedur pemberian skor yang diberikan kepada Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan Magang Berdampak, mengikuti pedoman penskoran penilaian yang tertera pada peraturan akademik Universitas Mulawarman.

Monitoring tidak hanya melalui kuesioner, tetapi juga bisa melalui:

- Laporan berkala mahasiswa
- Observasi langsung
- Wawancara dengan mitra
- *Logbook*/kegiatan harian
- Penilaian mentor atau supervisor

2. EVALUASI

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan Magang Berdampak. Evaluasi ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing Magang Berdampak dan oleh Mitra dalam hal ini Mentor/Pembimbing Lapangan Magang Berdampak. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh Mahasiswa selama mengikuti kegiatan Magang Berdampak, baik dalam bentuk *hard skills*, maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas akademik di Universitas Mulawarman selalu dilakukan evaluasi ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Evaluasi dan penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan

laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping yang telah ditunjuk.

1) Evaluasi dilakukan melalui :

- a) Laporan Bulanan Mahasiswa
- b) Laporan Akhir Mahasiswa
- c) Evaluasi Mitra dalam hal ini Mentor/Pembimbing Lapangan
- d) Evaluasi Dosen Pembimbing Magang Berdampak
- e) Evaluasi Magang Berdampak oleh Prodi/Fakultas
- f) Evaluasi Magang Berdampak oleh Universitas

2) Bobot Penilaian

Bobot penilaian Magang Berdampak dengan komponen berikut ini:

Tabel 2.9. Bobot Penilaian Evaluasi Magang

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Proses dan Kinerja Magang/Praktik Kerja	40%
2	Penulisan Laporan	20%
3	Artikel	25%
4	Video	15%

3) Ketentuan umum penilaian

- a) Proses dan Kinerja pelaksanaan Magang Berdampak, penulisan laporan, artikel, dan video Magang/Praktik Kerja dinilai oleh Dosen Pembimbing.
- b) Penilaian mengacu kepada format dan kriteria penilaian yang ditetapkan.
- c) Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada program studi
- d) Penilaian dilakukan dengan adil dan objektif.

4) Penilaian Prestasi Kinerja

Dalam melakukan kegiatan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa akan memperoleh penilaian dari dosen pembimbing dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja Magang/Praktik Kerja. Adapun butir-butir yang dinilai sebagai prestasi kerja diuraikan sebagai berikut.

- a) Kompetensi Bidang Kegiatan:
 1. Penguasaan Bidang Kegiatan
 2. Perencanaan Kegiatan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Evaluasi dan Tindak Lanjut
- b) Sikap dan Perilaku:
 1. Inisiatif
 2. Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan),
 3. Disiplin
 4. Penampilan
 5. Ketekunan
 6. Kemampuan teknikal
 7. Berpikir kritis, kreatif dan analitis
 8. Kemampuan bekerjasama dalam tim
 9. Kemampuan beradaptasi
 10. Hasil pekerjaan (kontribusi)

5) Penilaian Penulisan Laporan

Berikut adalah ketentuan umum mengenai Laporan Magang/Praktik Kerja.

1. Pada akhir pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan menulis Laporan Magang/Praktik Kerja.
2. Pedoman penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja dapat ditemukan pada Bab 6 dari buku pedoman ini.
3. Laporan Magang/Praktik Kerja harus disetujui oleh dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja.
4. Laporan Magang/Praktik Kerja harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program Magang/Praktik Kerja.
5. Dalam penyusunan Laporan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pembimbing.

Penilaian terhadap penulisan laporan Magang/Praktik Kerja yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Deskripsi proses kegiatan Magang/Praktik Kerja yang dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Gambaran umum mitra Magang/Praktik Kerja
 - b. Tugas mahasiswa selama Magang/Praktik Kerja dijelaskan dengan baik
2. Kelengkapan substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Argumentasi/alasan dari kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya ditulis secara jelas di latar belakang;
 - b. Mitra Magang/Praktik Kerja digambarkan secara detil dan lengkap;
 - c. Metode pelaksanaan tepat dan relevan;
 - d. Program-program yang dilaksanakan, hasil program yang dilaksanakan, tantangan yang ditemui, termasuk temuan- temuan baru selama pelaksanaan kegiatan, maupun uraian keberlanjutan program telah dijelaskan;
 - e. Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pelaksanaan Magang;
 - f. Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Magang/Praktik Kerja.
3. Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Mengikuti panduan laporan Magang Berdampak;
 - b. Logika penyajian yang runtut, dan
 - c. Bahasa yang baku serta ilmiah.
4. Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Magang Berdampak sebelum penilaian laporan akhir adalah:
 - a. laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing;
 - b. laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
 - c. dalam penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan mitra.

6) Penilaian Video

Butir penilaian Video Laporan Magang mencakup aspek berikut ini:

1. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Magang/Praktik Kerja)
2. Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
3. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
4. Kualitas gambar dan suara

J. PELAPORAN KEGIATAN

Selama mengikuti Program Magang Berdampak, mahasiswa memiliki tanggung jawab administratif dan akademik yang harus dipenuhi secara berkala. Kegiatan pelaporan ini menjadi bagian penting dalam proses monitoring, evaluasi, serta pencairan hak mahasiswa. Terdapat dua jenis laporan yang wajib disusun, yaitu laporan bulanan dan laporan akhir, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat:

- 1) Kegiatan yang dilakukan
- 2) Capaian Pembelajaran
- 3) Kendala yang dihadapi

Mahasiswa menyusun laporan bulanan yang berisi progres penyelesaian tugas/pembelajaran yang diperoleh selama 1 (satu) bulan pada akhir bulan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya meminta persetujuan Mentor/Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Magang terkait laporan bulanan yang telah dibuat dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan, maka nantinya Laporan akan diserahkan kepada Fakultas.

2. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

- 1) Pendahuluan
- 2) Profil Mitra
- 3) Kegiatan magang
- 4) Analisis hasil kegiatan

- 5) Kesimpulan dan rekomendasi
- 6) Dll, sebagaimana yang terlampir

Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan, kemudian meminta masukan terkait laporan akhir yang telah disusunnya kepada Mentor/Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Magang serta melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan, maka nantinya Laporan akan diserahkan kepada Fakultas.

K. PENILAIAN DAN MEKANISME KONVERSI SKS

1. SISTEM PENILAIAN

Penilaian dilakukan berbasis kinerja dan capaian deliverables. Komponen dan bobot penilaian dapat ditetapkan sebagai berikut (dapat disesuaikan kebijakan Prodi):

Tabel 2.10 Komponen dan Bobot Penilaian Magang

Komponen	Penilai	Bobot
Kinerja & Sikap kerja (disiplin, kolaborasi, etika)	Mentor Mitra	40 %
Kualitas deliverables / output berdampak	Mentor Mitra/Pembimbing Lapangan + Dosen Pembimbing Magang	30 %
Laporan Akhir Seminar / Presentasi	Dosen Pembimbing Magang	30 %

Nilai akhir ditetapkan Dosen Pembimbing Magang berdasarkan rekomendasi Mentor Mitra / Pembimbing Lapangan, kelengkapan dokumen, dan hasil seminar/presentasi. Prodi melakukan konversi/pengakuan SKS dan memasukkan nilai ke sistem akademik.

2. SISTEM KONVERSI SKS

Program Magang Berdampak dikelola oleh Tim/Koordinator Magang Berdampak Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Fakultas. Konversi SKS dilakukan melalui:

- a. Pemetaan aktivitas magang terhadap CPL/CPL-MK,
- b. Validasi rencana kerja dan output,
- c. Penilaian berbasis rubrik, dan
- d. Input nilai sesuai prosedur akademik Universitas.

Perhitungan beban magang mengikuti standar beban belajar. Contoh pendekatan: 1 SKS setara 170 menit/minggu selama 16 minggu; durasi magang 1 semester disetarakan dengan jam kerja yang disepakati (misalnya 40 jam/minggu) sehingga total jam memenuhi ekuivalensi SKS.

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Penilaian Mentor / Pembimbing Lapangan (40%)
2. Penilaian Dosen Pembimbing (30%)
3. Laporan akhir & Presentasi hasil magang (30%)

Nilai kegiatan magang dikonversi menjadi mata kuliah sesuai ketentuan Program Studi. Kegiatan Magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa akan memperoleh pengakuan dalam bentuk mata kuliah (structured form) maupun skill atau kompetensi yang didapat selama mengikuti kegiatan Magang Berdampak perpaduan antara rekognisi mata kuliah dan kompetensi ini disebut sebagai blended form. Secara lengkap pengakuan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Magang juga akan tercantum dalam SKPI. Mata kuliah dan kompetensi yang diakui setara sejumlah 20 SKS, jika mahasiswa mengikuti kegiatan sampai dengan waktu 6 bulan atau setara dengan 840 jam (secara kumulatif). Namun, mata kuliah dan kompetensi yang direkognisi juga perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi. CPL untuk BKP Magang Magang Berdampak, yaitu :

Tabel 2.11 CPL BKP Magang Berdampak

No	SKS	Total Jam/Smt
1	1	2380
2	2	4760
3	3	7140
4	4	9520
5	5	11900
6	6	14280
7	7	16660
8	8	19040
9	9	21420
10	10	23800
11	11	26180
12	12	18560
13	13	30940
14	14	33320
15	15	35700
16	16	38080
17	17	40460
18	18	42840
19	19	45220
20	20	59840

Atau Hybrid, penggabungan antara Durasi Magang dan CPL yang diperoleh selama magang disesuaikan dengan CPL mata kuliah yang akan dikonversi:

Tabel 2.12 Jumlah dan Syarat Konversi SKS

NO	JUMLAH KONVERSI SKS	SYARAT
1	Maksimal 20 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Magang Berdampak 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 6 bulan 4. Memenuhi CPL
2	Maksimal 16 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Magang Berdampak 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 5 bulan 4. Memenuhi CPL
3	Maksimal 14 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Magang Berdampak 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 4 bulan 4. Memenuhi CPL
4	Maksimal 12 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Magang Berdampak 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 3 bulan 4. Memenuhi CPL
5	Maksimal 6 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Magang Berdampak 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 2 bulan 4. Memenuhi CPL

Format Konversi SKS Magang Berdampak, maksimal 20 SKS untuk 1 semester Magang (± 6 bulan) dan Mata Kuliah yang dapat di konversi dengan berbasis CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) & OBE (*Outcome-Based Education*), antara lain :

A. Skema 1 – Umum (*General Legal Internship*)

(Digunakan jika Mitra beragam / tidak spesifik sektor)

Tabel 2.13 Mata Kuliah - Skema 1

No.	Mata Kuliah	SKS
1.	Hukum Acara Pidana	3
2.	Hukum Acara Perdata	2
3.	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
4.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
5.	Hukum dan Teknologi	2
6.	Perancangan Kontrak	2
7.		2
8.		2
9.		3
Total	SKS	20 SKS

B. Skema 2 - Jalur Pemerintahan & Kebijakan Publik

(Untuk Magang di Instansi Pemerintah, DPR/DPRD, Kementerian, dll.)

Tabel 2.14 Mata Kuliah - Skema 2

No.	Mata Kuliah	SKS
1.	Hukum Perizinan	2
2.	Hukum Lingkungan	3
3.	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2
4.	Perancangan Perundang-Undangan	3
5.	Penalaran Hukum	2
6.	Legal Audit	2
7.		2
8.		2
9.		2
Total	SKS	20

C. Skema 3 – Jalur Korporasi / Industri / Law Firm Non-Litigasi

(Untuk Magang di Perusahaan, BUMN, Kantor Hukum Bisnis)

Tabel 2.15 Mata Kuliah - Skema 3

No.	Mata Kuliah	SKS
1.	Hukum Ketenagakerjaan	2
2.	Hukum Perizinan	2
3.	Hukum Kekayaan Intelektual	2
4.	Perancangan Kontrak	2
5.	Legal Audit	2
6.	Hukum Perniagaan Internasional	2
7.		2
8.		2
9.		2
10.		2
Total	SKS	20

L. PENJAMINAN MUTU PROGRAM

Penjaminan mutu Magang Berdampak adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara konsisten agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh jaminan ketercapaian capaian pembelajaran, kualitas pengalaman kerja, dan kelayakan luaran.

1. Tujuan dilakukan agar:
 - a. Menjamin ketercapaian capaian pembelajaran dan relevansi tugas magang.
 - b. Menjamin kepatuhan proses (dokumen, logbook, monitoring, penilaian).
 - c. Menjaga keselamatan mahasiswa dan kepatuhan etika/kerahasiaan mitra.
 - d. Mendorong perbaikan berkelanjutan kualitas kemitraan dan pelaksanaan magang.
2. Penjaminan mutu dilakukan melalui:
 - a. Monitoring kegiatan magang
 - b. Evaluasi kepuasan mahasiswa
 - c. Evaluasi kepuasan mitra

- d. Perbaiki program secara berkelanjutan
- 3. Penjaminan Mutu ini diperuntukkan bagi:
 - a. Pimpinan Fakultas dan Program Studi
 - b. Tim Pengelola Magang Berdampak
 - c. Dosen Pembimbing Magang
 - d. Mitra dan Mentor/Pembimbing Lapangan
 - e. Mahasiswa peserta Magang Berdampak
- 4. Strategi Penjaminan Mutu di tingkat Prodi/Fakultas:
 - a. Standarisasi dokumen: *learning agreement*, *logbook*, rubrik penilaian, dan laporan akhir
 - b. Monitoring terjadwal (minimal 2 kali) dan mekanisme pelaporan kendala
 - c. Evaluasi akhir melalui seminar / presentasi dan umpan balik mitra
 - d. Audit Internal / AMI bila diperlukan, serta tindak lanjut perbaikan
- 5. Strategi mutu di tingkat Mitra:
 - a. Penetapan mentor, *job description*, dan lingkungan kerja yang aman
 - b. Umpan balik berkala terhadap kinerja mahasiswa
 - c. Validasi *output/deliverables* dan rekomendasi pengembangan
- 6. Standar Mutu Program mencakup:
 - a. Standar kompetensi dan CPL yang ditargetkan
 - b. Standar isi: ruang lingkup pekerjaan dan *deliverables*
 - c. Standar proses: pembekalan, pelaksanaan, *logbook*, monitoring
 - d. Standar penilaian: rubrik, komponen, bobot, dan validasi
 - e. Standar SDM: kualifikasi DPM/DPL dan mentor
 - f. Standar sarana/prasarana: akses kerja dan K3
 - g. Standar pengelolaan: dokumentasi, arsip, dan konversi SKS

M. PENGADUAN DAN TERMINASI PROGRAM

Mahasiswa dapat menyampaikan pengaduan kepada:

1. Dosen Pembimbing Magang
2. Program Studi / Fakultas
3. Perguruan Tinggi / Universitas

BAB III

PENUTUP

E-Pedoman Magang Berdampak ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kompetensi mahasiswa serta kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

E-Pedoman Magang Berdampak ini disusun sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan Magang Berdampak - Kampus Berdampak, khususnya pada Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Magang/Praktik Kerja di lingkungan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, standar, dan tata kelola yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak agar berjalan secara sistematis, terstruktur, serta sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam implementasinya, E-Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Program Studi, Fakultas, Universitas maupun Mitra kerja, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan magang/praktik kerja secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu. E-Pedoman ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan secara berkelanjutan, seiring dengan perkembangan kebijakan Pendidikan Tinggi, kebutuhan dunia kerja, serta dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian terhadap substansi pedoman akan senantiasa dilakukan guna menjaga relevansi dan kualitas implementasinya.

Dengan adanya E-Pedoman ini, diharapkan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman mampu menyelenggarakan Magang Berdampak secara konsisten dan berkualitas, serta menghasilkan lulusan yang berintegritas, beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif. Lulusan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga dan mengembangkan kearifan lokal dalam kerangka visi Universitas Mulawarman sebagai pusat unggulan dalam studi tropis.

REFERENSI

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Panduan Magang Berdampak
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 5358/Un17/Hk.02.03/2025 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Pembelajaran Transformatif di Perguruan Tinggi.
- Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman (2024). Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Mulawarman dengan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE)
- LPMP Universitas Mulawarman (2026). Bahan Tayang Pengembangan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education*
- Nurlaili, L. & Putri, R. R. (2023). *Outcome-Based Education (OBE): Penerapan dan Tantangan di Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
- Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Samosir, H., Siregar, T., & Samosir, R. C. (2025). *Outcome-Based Education (OBE)*

(Tim SEVIMA). (2024). *Outcome-Based Education: Panduan Komprehensif untuk Perguruan Tinggi Indonesia*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN

A. INFOGRAFIS REKRUTMEN & SELEKSI MAGANG BERDAMPAK

**Rekrutmen & Seleksi
MAGANG BERDAMPAK 2026**
Fakultas Hukum – Universitas Mulawarman

*“Belajar dari Dunia Nyata,
Memberi Dampak Nyata”*

INFORMASI PROGRAM

- Durasi:** 1 Semester (5–6 bulan)
- Konversi:** Hingga **20 SKS**
- Mitra:** Instansi Pemerintah, Kantor Hukum, LBH, Perusahaan, dll

PERSYARATAN MAHASISWA

Persyaratan Akademik

- Minimal Semester **4**
- ≥ **63 SKS**
- Persetujuan Prodi • Proposal Magang
- IPK ≥ **2,75**

TAHAPAN SELEKSI

- Pendaftaran Online
- Seleksi Administrasi
- Validasi Prodi
- Validasi Prodi
- Validasi Prodi • Seleksi Mitra
- Pengumuman & Pembekalan

MANFAAT PROGRAM

- Pengalaman Profesional
- Legal Skills & Networking
- Kesiapan Karir
- Kontribusi Masyarakat

OUTPUT MAHASISWA

- Legal Drafting
- Analisis Kasus
- Laporan Magang

AYO DAFTAR!
Jadilah bagian dari mahasiswa hukum yang tidak hanya belajar, tetapi juga berdampak!

No. HP : 085251764343 | <https://fh.unmul.ac.id>

B. ALUR MAGANG BERDAMPAK FH UNMUL



C. KUISIONER PRA-MAGANG BERDAMPAK UNTUK MITRA :

<https://forms.gle/qTNc5Mk3oNeQbU2p7>



KUESIONER PRA-MAGANG BERDAMPAK MITRA KERJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. IDENTITAS MITRA

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Nama Instansi/Perusahaan: *

Jawaban Anda

2. Alamat Lengkap: *

Jawaban Anda

D. LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Semester :
- 4. Jumlah SKS yang telah ditempuh :
- 5. IPK :
- 6. Instansi magang tujuan :

Kota, (hari, tanggal, bulan) 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa yang mendaftar

(.....) (.....)
NIP NIM

E. LEMBAR PERSETUJUAN ORANG TUA / WALI

**SURAT IZIN ORANG TUA/WALI
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor HP :
Alamat :

merupakan Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

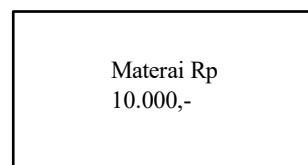
Nama :
NIM :

menyatakan bahwa **MENGETAHUI** dan **MENGIZINKAN** bahwa putra/putri saya mengikuti Magang pada program **MAGANG BERDAMPAK** pada.....** dan akan memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Sekaligus memberi pernyataan untuk **MENYETUJUI / TIDAK MENYETUJUI*** jika putra/putri saya melaksanakan program tersebut secara luring/offline apabila mitra kegiatan tersebut memerlukan pelaksanaan kegiatan secara luring/offline.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Kota, (hari, tanggal, bulan) 2026



()

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi nama mitra kegiatan sesuai yang dipilih oleh mahasiswa

F. FORM SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN PADA MITRA

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN PADA MITRA KERJA
PADA KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Menyatakan bersedia ditempatkan pada Mitra Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selama.....bulan apabila dinyatakan lulus seleksi Magang Berdampak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan/atau Mitra Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Yang menyatakan,

NAMA MAHASISWA.....

NIM.....

G. FORM LOGBOOK MAGANG BERDAMPAK

LOGBOOK KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK

Judul kegiatan	:
Lama kegiatan	:..... bulan
Total jam kegiatan	:..... jam
Jumlahkonversi SKS	:..... sks
Dosen pendamping	:.....

Minggu Ke – 1

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian

Catatan minggu ke 1

Kota,....., 2026

Mentor /Pembimbing Lapangan

Ttd dan stempel

Nama Lengkap

H. FORM CAPAIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM KEGIATAN MAGANG

Judul kegiatan	:	
Lama kegiatan	: bulan	
Total jam kegiatan	:jam	
Jumlah konversi SKS	: sks	
Dosen pendamping	:	
No	Minggu Ke	Kegiatan Magang	Capaian Pembelajaran
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		

	Nama Kota ,.....
Disetujui oleh, Dosen Pendamping 	Disusun oleh, Tanda tangan dan stempel

I. BUKU PRESENSI BIMBINGAN MAGANG BERDAMPAK

PRESENSI BIMBINGAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nama Mahasiswa :
NIM :
Lembaga/Instansi/Perusahaan :
Lama Kegiatan :
Total Jam Kegiatan :
Jumlah Konversi SKS :
Pembimbing Lapangan :
Dosen Pembimbing Magang :
No HP/WA :

No	Tgl Bimbingan	Materi	Catatan	Mentor/Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Dst					
Dst					

Catatan:

- a. Presensi bimbingan selalu diisi saat mahasiswa melakukan bimbingan
- b. Supervisor dan dosen pembimbing wajib mengisi materi bimbingan dan menandatangani.
- c. Presensi bimbingan ini dilampirkan pada saat mendaftar ujian hasil magang

J. FORMAT LAPORAN AKHIR MAGANG BERDAMPAK

1. Bagian awal berisi:

Halaman Sampul (Cover)

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar tabel/gambar/grafik (apabila ada)

Daftar lampiran (apabila ada)

2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Deskripsi Instansi/Lembaga/Perusahaan
- B. Struktur Organisasi
- C. Deskripsi Pekerjaan Magang

BAB II PELAKSANAAN MAGANG

- b. Penjelasan Log Book
- c. Hasil dan Bukti Pekerjaan

BAB III HASIL PEMBELAJARAN

- A. Manfaat Magang
- B. Penerapan Ilmu dalam Magang

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Deskripsi Bagian

Halaman Judul

- a. Pada bagian ini terdiri atas judul, logo, identitas penulis, dan identitas program studi. Judul diketik rata tengah dengan huruf balok dan dicetak tebal, ukuran 14 pt.
- b. Logo UNMUL berwarna, terletak di tengah dengan kira-kira ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. Identitas penulis terdiri dari nama lengkap dan NIM, ditulis kapital pada huruf awal kata dengan ukuran 12 pt. Halaman bagian bawah memuat identitas program studi ditulis rata tengah terletak di bagian akhir

K. HALAMAN COVER / JUDUL LAPORAN AKHIR MAGANG BERDAMPAK

**LAPORAN MAGANG BERDAMPAK
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
“NAMA INSTANSI MAGANG”**



Disusun Oleh :

Nama

NIM

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

L. HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG BERDAMPAK
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
“NAMA INSTANSI MAGANG”**



Disusun Oleh :

Nama

NIM

Telah Disetujui Untuk Ujian Magang pada tanggal: _____

Mentor/Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing

(Nama Mentor)

(Nama Dosen)

M. HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG BERDAMPAK
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
“NAMA INSTANSI MAGANG”**



Laporan magang ini telah disetujui dan disahkan serta diujikan di hadapan Tim Penguji Dalam ujian magang yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal :
Tempat :

Tim Penguji

1. Mentor / Pembimbing Lapangan :

2. Dosen Pembimbing :

Tanda Tangan

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman**

**(Dr. Rosmini, S. H., M.H.)
NIP. 19720625 200501 2 002**

N. KUISIONER PASCA - MAGANG BERDAMPAK UNTUK MITRA :

<https://forms.gle/DKE8C3JLfQMHLySZ9>



KUESIONER PASCA-MAGANG BERDAMPAK MITRA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. IDENTITAS MITRA

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Nama Instansi: *

Jawaban Anda

2. Nama Mentor/Pembimbing Lapangan: *

Jawaban Anda



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor: 5358/UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan capaian pembelajaran masyarakat dan kebutuhan pengguna lulusan serta masyarakat, perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tinggi, perlu dilakukan evaluasi terhadap substansi dan struktur kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 3944/SK/2020 tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan terukur yang kemudian menghasilkan dokumen perubahan substansi dan struktur kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa dokumen perubahan substansi dan struktur kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud huruf b telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan penetapan dan pemberlakuan;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3394/UN17/KP.12.05/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kesatu : Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2025 dan seterusnya.

Ketiga : Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tetap mempergunakan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 3944/SK/2020 tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas

Mulawarman sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2024.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2025

REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19670308 199203 1 001.

Tembusan:
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 5358/UN17/HK.02.03/2025
TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN

KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080164W001	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction to Legal Science</i>	4	1	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W002	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesia Law</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W003	Ilmu Negara <i>Theory of State</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Program Studi
MU0000603W001	Pendidikan Agama Islam <i>Islam Study</i>	3	1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000603W001	Pendidikan Agama Kristen Protestan <i>Christian Study</i>		1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000603W001	Pendidikan Agama Katolik <i>Catholic Study</i>		1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000603W001	Pendidikan Agama Budha <i>Budhism Study</i>		1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000603W001	Pendidikan Agama Hindu <i>Hinduism Study</i>		1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000603W001	Pendidikan Agama Kong Hu Cu <i>Kong Hu Cu Study</i>		1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000602W002	Pendidikan Pancasila <i>Pancasila Education</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000602W003	Pendidikan Kewarganegaraan <i>Civic Education</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000602W004	Pendidikan Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language Education</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Nasional
MU0000602W005	Ilmu Alamiah Dasar <i>Basic Natural Sciences</i>	2	1	-	Wajib	Wajib Nasional
25080164W004	Hukum Administrasi Negara <i>State Administrative Law</i>	4	2	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080164W005	Hukum Tata Negara <i>Constitution Law</i>	4	2	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080164W006	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	4	2	-	Wajib	Wajib Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080164W007	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	4	2	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W008	Hukum Internasional <i>International Law</i>	2	2	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W009	Bahasa Inggris Hukum <i>Legal English</i>	2	2	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W010	Hukum Konstitusi <i>Constitution Law</i>	2	3	HTN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W011	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	3	HTN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W012	Kewirausahaan <i>Entrepreneurship</i>	2	3	-	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W013	Hukum Bisnis <i>Business law</i>	2	3	H. Perdata	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W014	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	3	PIH. PHI	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W015	Antropologi Hukum <i>Anthropology of law</i>	2	3	PIH. PHI	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W016	Sosiologi Hukum <i>Sociology of Law</i>	2	3	PIH. PHI	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W017	Hukum Pidana Khusus <i>Special Criminal Law</i>	2	3	H. Pidana	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W018	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	2	3	H. Pidana, HTN.	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W019	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	3	PIH. PHI	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W020	Etika Hukum <i>Legal Ethic</i>	2	3	PIH. PHI, H. Perdata, H. Pidana, HTN, HAN, H. Internasional	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W021	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Treaty Law</i>	2	3	HI, H. Perdata	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W022	Hukum Acara Perdata <i>Civil Procedure Law</i>	2	4	H. Perdata	Wajib	Wajib Program Studi
25080163W023	Hukum Acara Pidana <i>Criminal Prosedure Law</i>	3	4	H. Pidana	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W024	Hukum Acara Tata Usaha Negara <i>Administrative Procedure Law</i>	2	4	HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W025	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <i>Constitutional Court Procedural Law</i>	2	4	HTN, H. Konstitusi	Wajib	Wajib Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080162W026	Hukum Acara Peradilan Agama <i>Religious Court Procedural Law</i>	2	4	H. Islam	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W027	Hukum dan Teknologi <i>Law and Technology</i>	2	4	H. Perdata, H. Pidana, HI	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W028	Hukum Ekonomi Syariah <i>Sharia Economic Law</i>	2	4	H. Perdata, H. Islam	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W029	Hukum Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Law</i>	2	4	H. Perdata, H. Pidana, HI.	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W030	Hukum Perniagaan Internasional <i>International Trade Law</i>	2	4	HI, H. Bisnis	Wajib	Wajib Program Studi
25080163W031	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	3	4	H. Perdata, HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W032	Hukum Pertambangan <i>Mining Law</i>	2	4	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan Pidana, HAN, HTN, H.I	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W033	Hukum Perizinan <i>Licensing Law</i>	2	5	HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W034	Hukum Ketenagakerjaan <i>Labour Law</i>	2	5	H. Perdata, HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080163W035	Hukum Lingkungan <i>Environment Law</i>	3	5	HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W036	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	5	HI, H. Pidana	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W037	Perancangan Kontrak <i>Contract Drafting</i>	2	5	H. Perdata, H. Bisnis, H.Perniagaan Internasional.	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W038	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum <i>Legal Research and Writing Methods</i>	2	5	PIH, PHI, H. Perdata, H. Pidana, HAN, HTN, H.I.	Wajib	Wajib Program Studi
25080163W039	Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislation Drafting</i>	3	5	HTN, HAN	Wajib	Wajib Program Studi
25080164W040	Peradilan Semu <i>Mock Trial</i>	4	5	H.Ac. Perdata, H.Ac. Pidana, H.Ac. TUN, H.Ac. Peradilan Agama, H.Ac. Konstitusi	Wajib	Wajib Program Studi
	MK Minat Studi	4	5		Wajib Minat Studi	
25080162W041	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	6	H. Perdata. H. Pidana	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W042	Hukum Kehutanan <i>Forestry Law</i>	2	6	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Wajib	Wajib Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080162W043	Pengantar Filsafat Hukum <i>Introduction to Philosophy of Law</i>	2	6	PIH, PHI, H. Perdata, H. Pidana, HAN, HTN, HI.	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W044	Anti Korupsi <i>Anti-Corruption</i>	2	6	H. Pidana	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W045	Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut <i>Coastal and Marine Protection Law</i>	2	6	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W046	Hukum Pajak dan Keuangan Negara <i>Tax Law and State Finance</i>	2	6	HAN, H. Pajak	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W047	Hukum Perubahan Iklim <i>Climate Change Law</i>	2	6	H. Lingkungan	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W048	Legal Audit <i>Legal Audit</i>	2	6	MPPH	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W049	Penalaran Hukum <i>Legal Reasoning</i>	2	6	PIH, PHI, H. Perdata, H. Pidana, HAN, HTN, HI.	Wajib	Wajib Program Studi
	MK Minat Studi	4	6		Wajib Minat Studi	
	MK Pilihan Minat Studi	2	6		Pilihan Minat Studi	
	MK Pilihan Minat Studi	2	7		Pilihan Minat Studi	
25080163W050	Kuliah Kerja Nyata (KKN) <i>Community Service Program/ Internship</i>	3	7	Lulus 96 SKS	Wajib	Wajib Program Studi
25080162W051	Hukum Perkebunan <i>Plantation Law</i>	2	7	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Wajib	Wajib Program Studi
25080164W052	Skripsi/Publikasi Ilmiah <i>Bachelor Thesis/ Academic Publications</i>	4	7	Lulus 108 SKS	Tugas Akhir/Skripsi	
25080162W053	Hukum Aparatur Sipil Negara <i>Civil Service Law</i>	2	5	Hukum Administrasi Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W054	Hukum Kepabeanan <i>Customs Law</i>	2	5	Hukum Administrasi Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W055	Hukum Penataan Ruang <i>Spatial Planning Law</i>	2	6	Hukum Administrasi Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W056	Hukum Pelayanan Publik <i>Public Service Law</i>	2	6	Hukum Administrasi Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162P057	Hukum Keimigrasian <i>Immigration Law</i>	2	6	Hukum Administrasi Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080162P058	Perbandingan HAN <i>Comparison of State Administration Laws</i>	2	6	Hukum Administrasi Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P059	Hukum Pengangkutan <i>Transportation Law</i>	2	7	Hukum Administrasi Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P060	Hukum Administrasi Lingkungan <i>Environmental Administrative Law</i>	2	7	Hukum Administrasi Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
25080162W061	Hukum Organisasi Internasional <i>International Organization of Law</i>	2	5	Hukum Internasional	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W062	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>	2	5	Hukum Internasional	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W063	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Dispute Settlement of International Law</i>	2	6	Hukum Internasional	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W064	Hukum Kewilayahan Negara <i>State Territorial Law</i>	2	6	Hukum Internasional	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162P065	Hukum Perdata Internasional <i>International Private Law</i>	2	6	Hukum Internasional	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P066	Hukum Lingkungan Internasional <i>International Environmental Law</i>	2	6	Hukum Internasional	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P067	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Counsellor Law</i>	2	7	Hukum Internasional	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P068	International Contract Drafting	2	7	Hukum Internasional	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
25080162W069	Hukum Pers <i>Journalism Law</i>	2	5	Hukum Tata Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W070	Hukum Lembaga Kepresidenan <i>Law of Presidential</i>	2	5	Hukum Tata Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W071	Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat <i>Law of The House of Representative</i>	2	6	Hukum Tata Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W072	Kekuasaan Kehakiman <i>Judge Authority</i>	2	6	Hukum Tata Negara	Wajib	Wajib Minat Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080162P073	Negara hukum dan demokrasi <i>State of law and democracy</i>	2	6	Hukum Tata Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P074	Hukum Pemilu <i>General Election Law</i>	2	6	Hukum Tata Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P075	Hukum Pemerintahan Desa <i>Law of Village Government</i>	2	7	Hukum Tata Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P076	Perbandingan Hukum Tata Negara <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	7	Hukum Tata Negara	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
25080162W077	Hukum Perbankan, Lembaga Jasa Keuangan dan Asuransi <i>Banking Law, Financial Services Institutions and Insurance Law</i>	2	5	Hukum Perdata	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W078	Hukum Perusahaan <i>Corporate Law</i>	2	5	Hukum Perdata	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W079	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha <i>Anti-Trust Law</i>	2	6	Hukum Perdata	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W080	Hukum Keperdataan Adat <i>Customary Civil Law</i>	2	6	Hukum Perdata	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162P081	Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang <i>Security and Debt Settlement Law</i>	2	6	Hukum Perdata	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P082	Hukum Perjanjian dan Kontrak Komersial <i>Contract Law and Commercial Contract Development</i>	2	6	Hukum Perdata	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P083	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	7	Hukum Perdata	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P084	Hukum Ekonomi Digital <i>Digital Economy Law</i>	2	7	Hukum Perdata	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
25080162W085	Kejahatan Sumber Daya Alam <i>Natural Resource Crime</i>	2	5	Hukum Pidana	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W086	Hukum Pidana Anak <i>Juvenile Criminal Law</i>	2	5	Hukum Pidana	Wajib	Wajib Minat Program Studi

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
25080162W087	Kejahatan Korporasi <i>Corporate Crime</i>	2	6	Hukum Pidana	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W088	Hukum Penitensier <i>Penitentiary Law</i>	2	6	Hukum Pidana	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162P089	Hukum Pidana Adat <i>Customary Criminal Law</i>	2	6	Hukum Pidana	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P090	Kejahatan Transnasional <i>Transnational Crime</i>	2	6	Hukum Pidana	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P091	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	7	Hukum Pidana	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P092	Viktimologi <i>Victimology</i>	2	7	Hukum Pidana	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
25080162W093	Hukum Keluarga dan Waris Islam <i>Law of Family and Inheritance in Islam</i>	2	5	Hukum Islam	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W094	Hukum Bisnis dan Kontrak Syariah <i>Sharia Business and Contract Law</i>	2	5	Hukum Islam	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W095	Filsafat Hukum Islam <i>Islamic Legal Philosophy</i>	2	6	Hukum Islam	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162W096	Hukum Islam dan Sumber Daya Alam <i>Islamic Law and Natural Resources</i>	2	6	Hukum Islam	Wajib	Wajib Minat Program Studi
25080162P097	Hukum Zakat dan Wakaf <i>The Law of Zakat and Waqf</i>	2	6	Hukum Islam	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P098	Penyelesaian Sengketa Syariah <i>Sharia Dispute Resolution</i>	2	6	Hukum Islam	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P099	Hukum Produk Halal <i>Halal Product Law</i>	2	7	Hukum Islam	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
25080162P100	Hukum Lembaga dan Keuangan Syariah <i>Sharia Institutions and Finance Law</i>	2	7	Hukum Islam	Pilihan	Pilihan Minat Program Studi
	Total	16				
	Pertukaran Mahasiswa <i>Students Exchange</i>	Tranfer kredit			Minimal Semester 3	
	Magang <i>Internship</i>	Minimal 2 bulan			Minimal Semester 4	

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
	Hibah/Kompetisi Penelitian dan Publikasi Ilmiah <i>Grants/Research Competitions and Academic Publications</i>					
	Karya Ilmiah yang dikompetisikan <i>Winning Academic Papers</i>					
	Proyek di Desa <i>Project in the Village</i>			Minimal 2 bulan	Minimal Semester 4	
	Proyek Kemanusiaan <i>Humanitarian projects</i>			Minimal 2 bulan	Minimal Semester 4	

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19670308 199203 1 001.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 5358/UN17/HK.02.03/2025
 TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA
 HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

DESKRIPSI MATA KULIAH
 KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
1	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction to Legal Science</i>	4	Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tentang hak dan kewajiban, penemuan hukum mazhab-mazhab dalam ilmu hukum dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum. Arti, tujuan dan fungsi hukum, sumber-sumber hukum. Beberapa konsep dasar (inti) dalam hukum, tentang hak dan kewajiban, penggolongan hukum, penemuan hukum, mazhab-mazhab dalam ilmu hukum beberapa ilmu pembantu bagi ilmu hukum, hukum dan masyarakat.
2	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesia Law</i>	2	Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum positif dalam hubungannya dengan Tata Hukum (Indonesia), sejarah Tata Hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia, asas-asas hukum di Indonesia (hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara).
3	Ilmu Negara <i>Theory of State</i>	2	Mata kuliah ini menjelaskan tentang sejarah, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara secara teoritis dan beberapa studi aplikasinya dalam praktik kenegaraan di Indonesia dan dunia.
4	Pendidikan Agama Islam <i>Islam Study</i>	3	Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
5	Pendidikan Agama Kristen Protestan <i>Christian Study</i>		Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
6	Pendidikan Agama Katolik <i>Catholic Study</i>		Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
7	Pendidikan Agama Budha <i>Budhism Study</i>	7	Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

8	Pendidikan Agama Hindu <i>Hinduism Study</i>		Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
9	Pendidikan Agama Kong Hu Cu <i>Kong Hu Cu Study</i>		Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
10	Pendidikan Pancasila <i>Pancasila Education</i>	2	Mata kuliah ini merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai Pancasila baik dalam tataran nilai maupun aplikasinya dalam kehidupan bangsa Indonesia.
11	Pendidikan Kewarganegaraan <i>Civic Education</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari materi yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
12	Pendidikan Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language Education</i>	2	Mata Kuliah ini mempelajari keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
13	Ilmu Alamiah Dasar <i>Basic Natural Sciences</i>	2	Mata kuliah ini menjadi peletak dasar-dasar IPA sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah dan ilmu pengetahuan secara umum. Materi ini mencakup 1.) Hakikat Ilmu Alamiah Dasar, 2.) Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya, 3.) Kelahiran Alam Semesta, 4.) Alam Semesta sebagai Sistem, 5.) Metode Ilmiah, 6.) Sumberdaya Alam, Lingkungan serta Pengelolaannya, 7.) Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Perkembangan, dan Implementasinya.
14	Hukum Administrasi Negara <i>State Administrative Law</i>	4	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan (administrasi) negara, serta prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.
15	Hukum Tata Negara <i>Constitution Law</i>	4	Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup Perbandingan HTN, metode dan tujuan perbandingan HTN, faktor yang mempengaruhi ketatanegaraan dan bermacam bentuk ketatanegaraan di dunia, perbandingan konstitusi dalam ketatanegaraan dari masa klasik sampai masa modern, ketatanegaraan dalam berbagai sistem pemerintahan, dan perbandingan HTN beberapa negara Asia Tenggara serta dunia.
16	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	4	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas dan teori dasar hukum perdata yang terdiri dari hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, dan daluwarsa, serta perkembangan hukum perdata dan analisisnya dalam implementasi kasus di masyarakat.
17	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	4	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar dalam mengenalkan kepada mahasiswa mengenai asas, teori Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP dan analisisnya dalam kasus-kasus sederhana terutama untuk menguji asas-asas dalam hukum pidana.

18	Hukum Internasional <i>International Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang asas-asas, teori dasar, sejarah, sumber hukum, subjek, objek, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, pengakuan dan yurisdiksi negara, tanggung jawab negara, cabang-cabang ilmu Hukum Internasional dan studi kasus berdimensi internasional.
19	Bahasa Inggris Hukum <i>Legal English</i>	2	Mata Kuliah ini mempelajari kosa kata dan struktur kalimat bahasa inggris dalam bidang hukum untuk membina mahasiswa agar mengetahui dan memahami sumber referensi hukum dalam Bahasa Inggris, baik berupa descriptive text maupun prescriptive text.
20	Hukum Konstitusi <i>Constitution Law</i>	2	Mata kuliah ini adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.
21	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22	Kewirausahaan <i>Entrepreneurship</i>	2	Mata kuliah ini merupakan aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Belajar mata kuliah kewirausahaan memotivasi mahasiswa untuk berkontribusi dalam dunia kewirausahaan sebagai wirausahawan muda yang mempunyai wawasan tentang kewirausahaan yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bersifat pembaruan (kreasi baru) yang berlangsung terus menerus.
23	Hukum Bisnis <i>Business law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik bentuk badan usaha, cara-cara pendirian dan bagaimana pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya, sumber hukum, serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan bisnis di Indonesia.
24	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	Mata kuliah ini menjelaskan alasan Hukum Islam ada dalam Kurikulum Fakultas Hukum, Pengertian Islam, Hukum Islam, Pandangan Islam tentang hubungan agama dan Ilmu Pengetahuan serta Pokok-pokok Ajaran Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fikih khusus mengenai al ahkam al khamsah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam.
25	Antropologi Hukum <i>Anthropology of law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan manfaat Antropologi Hukum, perbedaannya dengan hukum adat dan sosiologi hukum, sejarah perkembangan antropologi hukum, metode penelitian antropologi hukum, tipe budaya hukum, pluralisme hukum, teori-teori antropologi hukum dan penjabarannya, berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya, dan fungsi hukum diluar sengketa.
26	Sosiologi Hukum <i>Sociology of Law</i>	2	Mata Kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dan ruang lingkup Sosiologi Hukum, sosial dalam masyarakat dan perubahan perkembangan hukum, pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat terhadap perkembangan hukum, hukum sebagai alat rekayasa sosial, strategi penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum dalam pluralitas maupun dinamika

			masvarakat di Indonesia. Selanjutnya memformulasikan letak sosiologi hukum (sociology of law) dan socio legal jurisprudence untuk bisa mengetahui sebab hukum bekerja dari dua arah yang berbeda (modalitas social dan/atau hukum).
27	Hukum Pidana Khusus <i>Special Criminal Law</i>	2	Mata kuliah Hukum Pidana Khusus merupakan mata kuliah keahlian yang membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dan diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mata kuliah ini menekankan pada pemahaman tentang penyimpangan-penyimpangan asas hukum pidana umum, baik dalam ranah substantif maupun prosedural, yang diterapkan demi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa atau kejahatan berdimensi baru.
28	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis konsep, teori dan pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional Indonesia serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis persoalan aktual dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
29	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang teori dasar hukum adat, sistem hukum adat, unsur-unsur dan bentuk masyarakat hukum adat, hukum kekeluargaan dan waris adat, pidana adat, serta pengaturan hukum adat secara nasional dan internasional.
30	Etika Hukum <i>Legal Ethic</i>	2	Mata kuliah ini akan membahas atau menelaah tentang dan sekitar etika hukum, mulai dari pengertian dan sekitar etika yang meliputi manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pengertian etika dari para sarjana, sifat dan fungsi etika, macam-macam etika, beda etika dengan etiket, tentang dan sekitar moral yang meliputi pengertian moral, pengertian moral dari para sarjana, macam-macam moral serta tanggung jawabnya.
31	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Treaty Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas asas-asas, teori dasar, sejarah, subjek, objek, jenis, bentuk, proses pembentukan, persyaratan, modifikasi, penundaan dan pengakhiran Perjanjian Internasional antar negara maupun antar subjek hukum internasional lainnya serta studi kasus/analisis implementasi perjanjian internasional.
32	Hukum Acara Perdata <i>Civil Procedure Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori dasar, asas-asas hukum acara perdata, dasar-dasar hukum Indonesia, konsep-konsep perkembangan hukum acara perdata serta memahami upaya penyelesaian sengketa perkara di bidang hukum perdata melalui jalur litigasi.
33	Hukum Acara Pidana <i>Criminal Prosedure Law</i>	3	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara pidana berdasarkan KUHP, asas peradilan pidana, APH dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, proses pembuktian, memahami relasi antar kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pidana, upaya hukum dalam peradilan pidana.
34	Hukum Acara Tata Usaha Negara <i>Administrative Procedure Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai surat kuasa khusus, kuasa isidentil, kuasa intervensi; surat permohonan kuasa isidentil; surat permohonan intervensi; pembuatan surat gugatan; daftar alat bukti surat penggugat; surat jawaban; replik; duplik; pengajuan alat bukti surat tergugat, tergugat intervensi; pembuatan kesimpulan; putusan; penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrasi dan melalui gugatan.
35	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai sejarah hukum acara Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang berperkara dan legal standing pendaftaran permohonan yaitu permohonan tentang

	<i>Constitutional Court Procedural Law</i>		pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, permohonan tentang sengketa kewenangan lembaga negara, permohonan tentang pembubaran partai politik, permohonan tentang perselisihan hasil pemilu, permohonan tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. serta pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu penjadwalan sidang dan pemeriksaan persidangan. pembuktian dan alat-alat bukti yaitu pengertian pembuktian dan alat-alat bukti. putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tentang pengertian putusan, putusan Mahkamah Konstitusi dan isi putusan.
36	Hukum Acara Peradilan Agama <i>Religious Court Procedural Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Peradilan Agama sebagai hukum formil dalam menegakkan hukum materiil, khususnya hukum perdata Islam, dan mengajarkan bagaimana mengajukan gugatan/permohonan dalam kasus perceraian, penentuan kompetensi relatif/absolute, kumulasi gugatan, pemeriksaan perkara perceraian, pembiayaan anak, nafkah istri, harta bersama serta prosedur beracara terhadap sengketa ekonomi syariah.
37	Hukum dan Teknologi <i>Law and Technology</i>	2	Mata kuliah ini mengkaji Konsep dan Teori Hukum dan Teknologi untuk (1) mengkritisi Konvergensi Teknologi dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum dan teknologi yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum dan teknologi yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum dan teknologi, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum dan teknologi dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.
38	Hukum Ekonomi Syariah <i>Sharia Economic Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah (saham, obligasi dan reksadana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain.
39	Hukum Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Law</i>	2	Mata Kuliah ini membahas mengenai hak kekayaan intelektual, hak-hak yang melekat di dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta dan neighboring right, hak paten, hak merek, rahasia dagang dan informasi dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varitas tanaman, pokok-pokok pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual serta kedudukan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual menurut sudut pandang hukum nasional maupun internasional.
40	Hukum Perniagaan Internasional <i>International Trade Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang asas-asas, teori dasar, subjek, sumber Hukum Perniagaan Internasional, organisasi internasional bidang perdagangan, perdagangan kawasan perbatasan, dan praktik-praktik penyelesaian sengketa perniagaan internasional (studi kasus) serta membahas keikutsertaan Indonesia dalam perniagaan internasional dari perspektif hukum.
41	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	3	Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep pengaturan keagrarian di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain: pengertian agraria, hukum agraria, tanah dan hukum tanah, ruang lingkup hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, hak penguasaan atas tanah termasuk hak-hak atas tanah, hak ulayat, pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Reforma agraria serta penyelesaian sengketa agraria.

42	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum <i>Legal Research and Writing Methods</i>	2	Mata Kuliah ini mengajarkan cara meneliti dan menulis. Keterampilan meneliti dan menulis akan diarahkan pada capaian mata kuliah yaitu mengetahui, mengerjakan dan berhasil membuat disain riset.
43	Hukum Perizinan <i>Licensing Law</i>	2	Mata kuliah ini secara umum menelaah tentang eksistensi perizinan bagi pemerintah dan berbagai macam izin dengan bentuk, isi, sifat-sifat, serta prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan. Lebih spesifik Hukum Perizinan mengkaji tentang perizinan sebagai instrumen pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum pemerintahan.
44	Hukum Ketenagakerjaan <i>Labour Law</i>	2	Mata Kuliah ini mempelajari bidang-bidang hukum ketenagakerjaan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah hubungan kerja, yaitu sejarah dan pengantar hubungan perburuhan, Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, perselisihan industrial, penyelesaian perselisihan industrial, dan PHK.
45	Hukum Lingkungan <i>Environment Law</i>	3	Salah satu ciri khas ilmu hukum lingkungan adalah aspek perlindungan atas penggunaan sumber daya alam. Sistem perlindungan dilakukan dengan cara menerapkan instrument hukum yang tersedia yaitu penerapan sanksi administrasi sepanjang terkait dengan sistem perizinan, ertanggungjawaban perdata atas pelanggaran hak-hak keperdataan subyek hukum maupun lingkungan secara fisik, pertanggungjawaban pidana bilamana terkait dengan kejahatan lingkungan, dan pertanggungjawaban dalam perspektif hukum internasional (cakupan subyek dan varian peristiwanya). Bidang-bidang hukum ini, terutama dalam cakupan hukum nasional dapat diterapkan secara bersamaan tanpa harus menunggu penyelesaian instrumen bidang hukum yang lain (meniadakan prinsip subsidiaritas). Dalam mata kuliah ini, sistem pertanggungjawaban dilengkapi sistem hukum acara denan pertimbangan hukum lingkungan memiliki spesifikasi teknis dalam penentuan subyek penggugat, model pembuktian (scientific based evidence) yang umumnya tidak dikenal dalam HIR/RBG, maupun perluasan dalam norma-norma yang termaktub dalam KUHAP untuk dugaan tindak pidana lingkungan hidup.
46	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas asas, teori dasar, jenis-jenis kejahatan internasional seperti <i>transnational crime</i> , <i>trans organized crime</i> , dan <i>extra ordinary crime</i> berikut mekanisme penegakan hukum dan yurisdiksi lembaga penegak hukumnya.
47	Perancangan Kontrak <i>Contract Drafting</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang analisis perkembangan hukum kontrak, mengkaji berbagai macam bentuk kontrak dan mempelajari teknik-teknik perancangan atau pembuatan kontrak termasuk aplikasinya dalam praktek untuk menilai capaian mata kuliah.
48	Hukum Pertambangan <i>Mining Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan Hukum Pertambangan di kawasan Hutan Hujan Tropis (<i>Rain Tropical Forest</i>) dan lingkungannya. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengauasaan pertambangan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pertambangan baik Migas, dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembahasan komprehensif pada cakupan wilayah eksploarasi maupun eksploitasi pada wilayah darat dan/atau laut, skema pengelolaan, perdangannya, dan skema pengejaannya (jasa kotraktor, pemilik IUP-minerba/Pemegang

			wilayah kerja migas, jasa hulu (upstream), hilir (downstream), transportasi, skema pengejaanya, termasuk isu-isu yang menyertainya.
49	Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislation Drafting</i>	3	Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan teori dan pengaturan perancangan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan mempelajari teknik-teknik perancangan perundang-undangan.
50	Peradilan Semu <i>Mock Trial</i>	4	Mata kuliah ini sebagai hilir dari kemampuan penguasaan hukum acara dan berorientasi pada pencapaian professional skill lulusan. Penguasaan substansi isu-isu perdata, pidana, ketatanegaraan, hukum islam akan digabungkan dengan kemampuan penguasaan hukum acara melalui praktek. Bahkan, kemampuan menulis (litigation language) dan kemampuan argumentasi melalui contra-argumentasi akan teruji melalui proses peradilan semu dengan menghadirkan Hakim, jaksa, penyidik, pengacara untuk memperikan nilai kompetensi atas capaian pembelajaran.
51	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	mempelajari tentang konsep perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pengertian dan latar belakang hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, peranan hukum dalam perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, masalah hukum berkaitan dengan kedudukan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum keperdataan dalam perlindungan konsumen, aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, lembaga/instansi dan peranannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.
52	Hukum Kehutanan <i>Forestry Law</i>	2	Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan kehutanan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang Kehutanan. Adaptasi pergeseran fungsi hutan dan system perlindungan dan pengelolaan hutan. MK ini akan mensistematisasi penggunaan Kawasan hutan (alokasi ruang hutan dan peruntukan) dalam konteks penunjukan, penetapan, dan pengukuhan Kawasan hutan dan varian penggunaan konservasi-ekonomi (perdagangan karbon sektor kehutanan).
53	Pengantar Filsafat Hukum <i>Introduction to Philosophy of Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas pemahaman dasar filsafat hukum mulai dari definisi, sejarah perkembangan, metode, tugas dan ruang lingkupnya yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aliran-aliran pemikiran yang ada dalam filsafat hukum.
54	Anti Korupsi <i>Anti-Corruption</i>	2	Mata kuliah ini didesain sebagai pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pemahaman hukum positif. Mahasiswa akan mempelajari korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana luar biasa (<i>extraordinary crime</i>), tetapi juga sebagai fenomena sosial, budaya, dan perilaku. Fokus pembelajaran meliputi pembedahan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, modus operandi korupsi di sektor publik dan swasta, serta strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
55	Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan dan memberikan bekal pengetahuan dan

	<i>Coastal and Marine Protection Law</i>		kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan perlindungan pesisir dan laut dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pesisir dan laut dalam lingkup lokal, nasional dan internasional dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan perlindungan pesisir dan laut.
56	Hukum Pajak dan Keuangan Negara <i>Tax Law and State Finance</i>	2	Mata kuliah ini menjelaskan asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara, teori perpajakan serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan bidang perpajakan di Indonesia.
57	Hukum Perubahan Iklim <i>Climate Change Law</i>	2	Mata kuliah ini merupakan isu spesifik yang menjadi perhatian global yang di lihat dari sisi hukum dan kebijakan meskipun bermula dari perspektif global, sasaran pada konsentrasi area dan isu pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan mempengaruhi orientasi mitigasi risiko perubahan iklim. Pada bagian lain, hukum perubahan mempersiapkan mahasiswa memiliki basis pengetahuan global-nasional-lokal dan kesiapan hukum yang tersedia dalam merespon kebutuhan pelebagaan, kerja sama dan isu perdagangan carbon.
58	Legal Audit <i>Legal Audit</i>	2	Mata kuliah ini merupakan bagian dari kemahiran hukum melalui kegiatan mengidentifikasi objek audit (lingkup dan cakupan audit), sistematika syarat hukum, ketercukupan dan pengujian secara tuntas (legal due diligence). Hasil legal audit berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan investasi, akuisisi, merger, pengujian atas peristiwa hukum yang telah terjadi baik terhadap peristiwa hukum privat maupun hukum publik. Dokumen praktek berasal dari dokumen yang telah teruji dan pernah digunakan sebagai objek legal audit sepanjang memiliki SOP keamanan original dokumen (asal dokumen). Dokumen yang dihasilkan dari proses legal audit dapat berupa Dokumen legal audit atau dibuat dalam bentuk legal opinion.
59	Penalaran Hukum <i>Legal Reasoning</i>	2	Mata kuliah ini adalah mata kuliah kemahiran hukum yang salah satunya ditentukan oleh kemampuan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dilakukan melalui proses pengidentifikasian isu-isu hukum (subyek-objek peristiwa, penentuan peristiwa, hubungan hukum, dan kualifikasi hukum), intepretasi, dan konstruksi hukum. Penalaran hukum menggunakan logika dan bahasa sebagai yang membantu memperjelas dan menghindari kesesatan berpikir (fallacy) dalam menyusun kesimpulan pekerjaan teknis hukum.
60	KKN <i>Community Service Program/ Internship</i>	3	Kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul.
61	Hukum Perkebunan <i>Plantation Law</i>	2	Mata kuliah ini akan mempelajari isu Perkebunan (A-Z plantation issues) dari pelaku usaha Perkebunan, pengadaan lahan, proses perizinan, produk Perkebunan dan penggunaannya dalam bingkai regulasi yang tersedia, kelembagaan, pengaturan, dan isu tematik setiap jenis dan produk Perkebunan (konsumsi dan komplementer bahan baku industry).
62	Skripsi/Publikasi Ilmiah <i>Bachelor Thesis/ Academic Publications</i>	4	
63	Hukum Aparatur Sipil Negara <i>Civil Service Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tata nilai dalam penyelenggaraan negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, sistim kepemimpinan nasional, visi bangsa dan kompetensi aparatur negara, etika kehidupan berbangsa.

64	Hukum Kepabeanan <i>Customs Law</i>	2	Mata kuliah ini memberikan materi terkait dari peran pabean atau Pelabuhan yang berfungsi bongkar muat dimana ada proses hukum administrasi negara. Sehingga materi ini bermuatan regulasi kepabeanan dan didalamnya menyangkut bea cukai, stakeholder kepabeanan dan kewenangannya, eksper dan impor, penerapan pelayanan kepabeanan melalui elektronik (National single windows) memuat Indonesia National single windows (INSW), studi dokumen2 kepabeanan seperti B/L (<i>Bill of Laeding</i>), <i>Letter of Credit</i> (L/C) dalam keperdataan sebagai irisannya, perizinan, kelayakan bongkar muat irisan administrasi negara.
65	Hukum Penataan Ruang <i>Spatial Planning Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang filosofi dan pentingnya penataan ruang, pada bagian lain MK ini menjelaskan tentang pola distribusi penggunaan ruang baik didarat maupun di laut sebagai satu kesatuan perencanaan ruang. Tahapan penataan ruang yang mengikuti pola penetapan ruang secara nasional menjadi bagian dari sistem penataan ruang pada tingkat provinsi/ kabupaten/kota Pola distribusi penataan ruang mencakup alokasi yang seimbang dan adil berbagai aktivitas subyek hukum bahwa area area perlindungan, konservasi dan pencadangan penggunaan ruang pada masa yang akan datang.
66	Hukum Pelayanan Publik <i>Public Service Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang 2 (dua) kerangka dasar yaitu, pembahasan tentang Hukum Pelayanan Publik dengan merujuk pada prinsip-prinsip penataan Negara yang modern yang berlaku saat ini yang berkisar pada teori-teori Good Governance dan Reint Venting Government, selain itu, perkuliahan ini juga secara spesifik diperkaya dengan pembahasan mengenai konsep Pelayanan Publik dan Good Governance di Indonesia.
67	Hukum Keimigrasian <i>Immigration Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari konsep, teori keimigrasian, keimigrasian dalam sistem hukum indonesia, politik hukum keimigrasian, ruang lingkup, prinsip, perlindungan warga negara serta pencegahan dan penanganan kasus dalam keimigrasian.
68	Perbandingan HAN <i>Comparison of State Administration Laws</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari berbagai sistem hukum Administrasi Negara-negara lain di dunia.
69	Hukum Pengangkutan <i>Transportation Law</i>	2	Mata Kuliah ini menyajikan definisi, Sejarah, jenis atau macam-macam pengangkutan. Pengangkutan dimaksud menurut tempatnya mulai dari angkutan darat, udara, laut dan atau perairan darat dan penyeberangan. Hubungan hukum pengangkutan dari pemerintah kepada pengguna pengangkutan (administrasi negara), dan irisan (keperdataan) pengangkutan dari orang dan badan hukum.
70	Hukum Administrasi Lingkungan <i>Environmental Administrative Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Sumber Daya Alam belum tentu lingkungan tetapi lingkungan bisa jadi Sumber Daya Alam (SDA). Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, Amdal dalam upaya perlindungan hukum, Amdal sebagai instrumen untuk mewujudkan Good Environmental Governance, Amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan, mekanisme perijinan lingkungan, perijinan lingkungan, penegakan hukum administrasi hukum lingkungan, gugatan administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
71	Hukum Organisasi Internasional <i>International Organization of Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas teori dasar hukum organisasi internasional antara lain definisi, subjek, objek, sumber hukum, pembentukan, klasifikasi, tipologi, kepribadian hukum, wewenang, hak-hak istimewa/kekebalan organisasi internasional, dan keputusan organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini juga melakukan analisis terhadap peran Indonesia dalam percaturan organisasi internasional.

72	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas konsep perang dan konflik bersenjata serta yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag beserta protokol-protokol tambahan yang berlaku serta melakukan analisis terhadap perkembangan isu dan peristiwa <i>humanitarian</i> yang terjadi di berbagai negara.
73	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Dispute Settlement of International Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas asas, teori, tipologi, jenis, dan berbagai metode penyelesaian sengketa internasional (litigasi dan non litigasi) yang disertai dengan analisis terhadap sengketa internasional yang terjadi, baik sengketa antar negara maupun non-negara.
74	Hukum Kewilayahan Negara <i>State Territorial Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas kedaulatan dan hak berdaulat wilayah negara dari perspektif hukum laut, hukum maritim, hukum udara, hukum angkasa, dan hukum perbatasan negara yang disertai dengan analisis terhadap kasus-kasus sengketa kewilayahan yang terjadi terutama yang melibatkan Indonesia.
75	Hukum Perdata Internasional <i>International Private Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas hubungan hukum antar subjek perdata (orang dan badan hukum) yang berdimensi lintas batas negara dan implikasinya yang disertai dengan analisis kontrak bisnis internasional dan studi kasus penyelesaian sengketa perdata internasional dengan memperhatikan aspek <i>conflict of laws, choice of law, choice of forum/jurisdiction, and recognition and enforcement of foreign judgments.</i>
76	Hukum Lingkungan Internasional <i>International Environmental Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas teori dan konsep Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam menjawab isu-isu lingkungan internasional.
77	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Counsellor Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang politik luar negeri, hubungan internasional, fungsi, jenis/tingkatan, hak istimewa dan kekebalan, serta mekanisme pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler berbasis Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Konvensi Wina 1975 yang disertai dengan analisis praktik dan studi kasus aktual yang melibatkan aktor-aktor diplomatik dan konsuler.
78	International Contract Drafting	2	Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik penyusunan kontrak bisnis internasional disertai dengan praktik penyusunan kontrak bisnis internasional yang meliputi penyusunan title, introductory paragraph, recitals, definitions, consideration, conditions precedent, representations and warranties, covenants, indemnities, events of default, remedies, termination, boilerplate, concluding clause, signature blocks, and exhibits.
79	Hukum Pers <i>Journalism Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar Hukum Pers di Indonesia, aspek perkembangan dan pengaturan hukum pers, aspek kesejarahan dan kelembagaan, aspek teortik tentang Pers, aspek kasus yang terjadi dalam dunia pers, serta memahami kepada mahasiswa tentang eksistensi Pers di Era revolusi Industri 4.0.
80	Hukum Lembaga Kepresidenan <i>Law of Presidential</i>	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam azas trias politica, konsekuensi prinsip kekuasaan, wewenang eksekutif, fungsi eksekutif, tipe lembaga eksekutif, sistem lembaga eksekutif, hal mempengaruhi kekuasaan eksekutif, jenis eksekutif, azas dalam eksekutif, azas pembentukan lembaga, perkembangan

			kekuasaan eksekutif di Indonesia, orde lama, baru dan era reformasi, komparasi kewenangan persiden orba vs reformasi.
81	Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat <i>Law of The House of Representative</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan kedaulatan rakyat dengan pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang meliputi teori kedaulatan rakyat, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan serta kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; kelembagaan DPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaa DPD; dan lembaga perwakilan rakyat daerah.
82	Kekuasaan Kehakiman <i>Judge Authority</i>	2	Mata kuliah ini membahas tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, faktor penegakan hukum, independensi pengadilan Indonesia sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum dan peradilan. Peradilan umum dan khusus, Komisi Yudisial, Kebijakan asasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
83	Negara hukum dan demokrasi <i>State of law and democracy</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari konsep negara, hukum dan sistem demokrasi secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan filosofis, historis, politis dan yuridis. Dibicarakan pula mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum sebagai implikasi dari determinasi hukum atas politik.
84	Hukum Pemilu <i>General Election Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan sistem pemilu. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem pemilu yang dianut di Indonesia serta beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan partai politik dan pemilu. Melalui mata kuliah ini juga akan disampaikan pengetahuan teoritis tentang Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara demokrasi, serta hukum positif.
85	Hukum Pemerintahan Desa <i>Law of Village Government</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang hakekat hukum pemerintahan desa, sejarah desa dan pemerintahan desa, perdebatan desa dalam konstitusi, pengaturan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan desa dan pengujian peraturan desa.
86	Perbandingan Hukum Tata Negara <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup Perbandingan HTN, metode dan tujuan perbandingan HTN, faktor yang mempengaruhi ketatanegaraan dan bermacam bentuk ketatanegaraan di dunia, perbandingan konstitusi dalam ketatanegaraan dari masa klasik sampai masa modern, ketatanegaraan dalam berbagai sistem pemerintahan, dan perbandingan HTN beberapa negara Asia Tenggara serta dunia.
87	Hukum Perbankan, Lembaga Jasa Keuangan dan Asuransi <i>Banking Law, Financial Services Institutions and Insurance Law</i>	2	Mata kuliah ini membahas mengenai perbankan dan lembaga jasa keuangan serta perkembangannya di Indonesia, termasuk didalamnya adalah perkembangan perbankan konvensional dan syariah. Lembaga jasa keuangan yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pada pengaturan, macam, fungsi, ruang lingkup, dan Otoritas Jasa Keuangan serta keterkaitan di antara lembaga jasa keuangan tersebut. pengetahuan dasar tentang

			asuransi serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan asuransi di Indonesia
88	Hukum Perusahaan <i>Corporate Law</i>	2	Mata kuliah ini mengajarkan untuk mendalami pemahaman mengenai hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia dengan perkembangannya terutama menguraikan mengenai jenis-jenis badan usaha dan seluk-beluknya.
89	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha <i>Anti-Trust Law</i>	2	Mata Kuliah ini mempelajari tentang sejarah, dan asas-asas hukum persaingan usaha, teori pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. mempelajari dan menganalisis mengenai sengketa hukum perdata yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya dan kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
90	Hukum Keperdataan Adat <i>Customary Civil Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang lingkup keperdataan yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang mencakup tentang pembahasan hukum adat yang lebih menitikberatkan kepada aspek keperdataan dari masyarakat adat. Membahas tentang perkawinan dalam masyarakat adat, pewarisan dalam masyarakat adat, hukum perikatan, hukum jaminan keperdataan adat, dan lain sebagainya.
91	Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang <i>Security and Debt Settlement Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan teori hukum jaminan, penggolongan dan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan, ruang lingkup jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal laut dan hipotek pesawat udara, jaminan perorangan, bank garansi, surety bond, Resi Gudang Privilege dan hak retensi.
92	Hukum Perjanjian dan Kontrak Komersial <i>Contract Law and Commercial Contract Development</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang sistematika Buku III KUHPperdata, asas-asas dan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, macam-macam perikatan, pelaksanaan dan akibat perjanjian, wanprestasi dan risiko, cara penafsiran perjanjian, cara hapusnya perikatan, perikatan yang lahir dari undang-undang serta dipengaruhi oleh perkembangan Kontrak Komersial.
93	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari pengertian investasi dan dasar hukum investasi, dasar hukum dan asas-asas investasi, jenis jenis dan bidang usaha menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2007, investasi dan penanaman modal baik itu asing dan dalam negeri.
94	Hukum Ekonomi Digital <i>Digital Economy Law</i>	2	Mata Kuliah Hukum Ekonomi Digital mengkaji perkembangan dan tranformasi hubungan hukum perdata dalam ekosistem ekonomi digital yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi, platform digital, dan transaksi elektronik. Kajian difokuskan pada adaptasi konsep fundamental hukum perdata meliputi, perjanjian, perikatan, tanggungjawab hukum perdata pelaku usaha digital, serta perlindungan konsumen dan data pribadi sebagai objek hukum perdata.
95	Kejahatan Sumber Daya Alam <i>Natural Resource Crime</i>	2	Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kejahatan sumber daya alam dari berbagai perspektif, urgensi pengaturan kejahatan sumber daya alam, bentuk dan jenis peraturan terkait kejahatan sumber daya alam, bentuk-bentuk kejahatan sumber daya alam dan cara menanggulangi Kejahatan sumber daya alam.
96	Hukum Pidana Anak <i>Juvenile Criminal Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari hukum pidana anak sebagai asset generasi bangsa baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban serta dengan tujuan menjamin kesejahteraan tiap warga

			negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
97	Kejahatan Korporasi <i>Corporate Crime</i>	2	Mata kuliah ini mengkaji tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui teori <i>strict liability</i> dan <i>vicarious liability</i> , juga tipe kejahatan yang dilakuakn korporasi.
98	Hukum Penitensier <i>Penitentiary Law</i>	2	Mata kuliah ini mengkaji secara kritis sistem sanksi dalam hukum pidana, meliputi teori pemidanaan, jenis-jenis pidana, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Fokus utama adalah transformasi paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Mahasiswa akan mempelajari dinamika pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, pidana denda, pidana kerja sosial (KUHP Baru), tindak/perawatan rehabilitasi, serta politik hukum pidana mati dan penjara seumur hidup.
99	Hukum Pidana Adat <i>Customary Criminal Law</i>	2	Mata kuliah ini mengkaji eksistensi Hukum Pidana Adat pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang menandai pergeseran fundamental asas legalitas dari <i>formil</i> menuju <i>materil</i> (Pasal 2 ayat 1). Fokus utama pembelajaran adalah analisis kritis terhadap konsep 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat' (<i>The Living Law</i>) sebagai dasar pemidanaan yang sah di Indonesia.
100	Kejahatan Transnasional <i>Transnational Crime</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional (<i>international crime</i>) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (<i>transnational crime</i>).
101	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.
102	Viktimologi <i>Victimology</i>	2	Mata kuliah ini mengkaji posisi korban yang sering terlupakan dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>the forgotten party</i>). Fokus pembelajaran adalah pergeseran paradigma dari <i>Retributive Justice</i> (pembalasan) menuju <i>Restorative Justice</i> (pemulihan), di mana hak-hak korban menjadi sentral. Mahasiswa akan mempelajari tipologi korban, peran korban dalam terjadinya kejahatan (<i>victim precipitation</i>), serta mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan hak (restitusi/kompensasi). Melalui studi kasus, mahasiswa dilatih untuk menganalisis kasus tanpa terjebak pada bias <i>victim blaming</i> dan mampu merancang skema perlindungan bagi kelompok rentan.
103	Hukum Keluarga dan Waris Islam <i>Law of Family and Inheritance in Islam</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan dan peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia menurut syariat Islam.
104	Hukum Bisnis dan Kontrak Syariah <i>Sharia Business and Contract Law</i>	2	Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi (muamalah) dan akad-akad bisnis dalam Islam. Mata kuliah ini menekankan pada keabsahan kontrak dan penghindaran unsur terlarang.
105	Filsafat Hukum Islam <i>Islamic Legal Philosophy</i>	2	Mata kuliah ini menggali hakikat, tujuan, dan dasar pemikiran di balik penetapan hukum Islam. Tujuannya adalah membangun pemahaman kritis tentang mengapa suatu hukum ditetapkan.
106	Hukum Islam dan Sumber Daya Alam <i>Islamic Law and Natural Resources</i>	2	Mengkaji perspektif Islam terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

107	Hukum Zakat dan Wakaf <i>The Law of Zakat and Waqf</i>	2	Mempelajari regulasi dan manajemen instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi.
108	Penyelesaian Sengketa Syariah <i>Sharia Dispute Resolution</i>	2	Mata kuliah ini membahas mekanisme penyelesaian konflik dalam lingkup hukum keluarga maupun ekonomi syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
109	Hukum Produk Halal <i>Halal Product Law</i>	2	Mengkaji regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim.
110	Hukum Lembaga dan Keuangan Syariah <i>Sharia Institutions and Finance Law</i>	2	Mempelajari kerangka hukum dan regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah.

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19670308 1992031 001